

DIALOG GLOBAL

6.4

4 edisi per tahun dalam 17 bahasa

Sosiologi, Politik dan Kekuasaan

Anthony Giddens

Stagnasi Ekonomi Yunani

Vassilis Fouskas,
Maria Markantonatou,
John Milios,
Spyros Sakellariopoulos,
Stratos Georgoulas

Aborsi di Amerika Latin

Julia McReynolds-Pérez,
Susana Lerner, Lucía Melgar,
Agnès Guillaume,
Erika Busse

Ilmu Sosial di Dunia Arab

Mohammed Bamyeh,
Seteney Shami,
Idriss Jebari

Kolom Khusus

- > George Ritzer tentang McDonaldisasi dan Prosumsi
- > 40+ tahun Bersama Sosiologi Internasional
- > Memperkenalkan Tim Editorial Jepang

MAJALAH



International
Sociological
Association
isa

VOLUME 6 / EDISI 4 / DESEMBER 2016
www.isa-sociology.org/global-dialogue/

DG



> Editorial

Menoleh ke Belakang, Memandang ke Depan

Edisi ini berlanjut menoleh ke belakang dan memandang ke depan, melakukan refleksi terhadap enam tahun terakhir *Dialog Global*, dan ayunan dari gerakan sosial yang bergelora – Indignados, Pendudukan (*Occupy*), Reformasi Arab (*Arab Spring*), dll. – ke gerakan kaum kanan yang telah menegakkan rezim-rezim otoriter di Mesir, Turki, Polandia, Hongaria, Filipina, Argentina, dan Brasil. Kecenderungan global ini untuk sebagian dapat ditelusuri ke badai kapitalisme internasional yang menggilas negara-bangsa, menyedot otonomi pemerintahan dan mendiskreditkan politik pemilihan yang resmi, menuju ke populisme kanan maupun kiri – walaupun semakin condong ke kanan.

Oleh sebab itu sudah tepatlah bahwa kami membuka edisi ini dengan sebuah wawancara dengan Anthony Giddens, teoritis dan pakar publik mengenai apa yang pernah disebutnya sebagai pendorong globalisasi. Dengan jubah politiknya sebagai anggota *House of Lords* ia terus memperjuangkan isu-isu yang menjadi kepeduliannya sebagai seorang sosiolog – isu-isu seperti perubahan iklim dan implikasi era digital.

Sisi bawah globalisasi nampak terwujud dalam nasib Syriza, gerakan yang hampir membuat Uni Eropa bertekuk lutut, tetapi pada akhirnya, dengan pemutarbalikan tenaga, menjadikan Yunani bertekuk lutut. Di sini kami menerbitkan lima artikel yang menceritakan konsekuensi buruk dari penghematan yang dikenakan Uni Eropa pada Yunani, dengan membawa kemiskinan tak terhitung terhadap Yunani, tetapi juga kekayaan tak terhitung bagi kelas-kelas atasnya.

Di Amerika Latin, sebagai reaksi terhadap negara demokrasi sosial selama satu dekade atau lebih – apa yang dinamakan *pink tide* [gelombang pasang merah muda, merujuk pada gerakan sosial kaum kiri Amerika Latin] – negara demi negara takluk pada pergeseran ke kanan. Di sini kami menerbitkan tiga artikel mengenai angin perubahan seperti yang tercermin dalam perjuangan di sekitar aborsi. Protes inovatif telah menyebabkan bentrokan dengan negara di Argentina, Meksiko dan Peru. Yang khususnya menarik adalah perjuangan mengenai penggunaan obat-obatan biasa untuk menghindari atau mencegah kehamilan.

Kami memiliki tiga perspektif mengenai nasib ilmu sosial Arab. Diskusi dipicu oleh laporan pertama mengenai keadaan disiplin, yang ditulis oleh Mohamed Bamyeh. Dia memulai simposium dengan suatu esai ringkasan, diikuti oleh desakan Seteney Shami mengenai pentingnya mengubah infrastruktur ilmu sosial. Idriss Jebari mengajukan pertanyaan-pertanyaan kritis mengenai implikasi *Arab Spring* dan kesudahannya, meningkatkan kemungkinan bahwa *Arab Spring* terus memberikan vitalitas dan arah baru untuk ilmu sosial.

Kami menerbitkan suatu ekstrak dari suatu wawancara dengan sosiolog terkenal, George Ritzer, dilakukan oleh Labinot Kunushevc, seorang sosiolog yang muda dan giat dari Kosovo. Edward Tiryakian menawarkan kepada kita sekilas ke masa lalu dengan kenangannya mengenai kongres-kongres ISA mulai dari tahun 1974. Kami mengakhiri dengan memperkenalkan tim editor Jepang yang dipimpin oleh Satomi Yamamoto yang mengilhahi mahasiswa-mahasiswanya untuk mengabdikan diri pada gairah penerjemahan. Dalam hubungan ini, saya dengan senang hati mengumumkan peresmian bahasa *Global Dialogue* yang ke-17 – Bahasa Bengali – diselenggarakan oleh suatu tim sosiolog yang antusias yang menetap di Dhaka (Bangladesh) dan dipimpin oleh Habibul Khondker.

> **Dialog Global** dapat diperoleh dalam 17 bahasa pada [Website ISA](#)

> Naskah harap dikirim ke burawoy@berkeley.edu



Anthony Giddens, sosiolog dan ahli teori Inggris Raya, sekarang seorang politisi di Dewan Bangsawan, mengisahkan tantangan yang dihadapi seorang sosiolog di bidang politik



Stagnasi Perekonomian Yunani. Lima artikel menggambarkan dampak perundingan tingkat tinggi para perunding Eropa mengenai persyaratan bagi keberlanjutan keanggotaan Yunani dalam Uni Eropa



Aborsi di Amerika Latin. Tiga artikel mengisahkan perjuangan perihal aborsi di Argentina, Meksiko dan Peru



Dialog Global dapat terselenggara berkat dana hibah dari **SAGE Publications**.

> Dewan Redaksi

Editor: Michael Burawoy.

Rekan Editor: Gay Seidman.

Editor Pelaksana: Lola Busuttil, August Bagà.

Editor Konsultasi:

Margaret Abraham, Markus Schulz, Sari Hanafi, Vineeta Sinha, Benjamin Tejerina, Rosemary Barbaret, Izabela Barlinska, Dilek Cindoğlu, Filomin Gutierrez, John Holmwood, Guillermina Jasso, Kalpana Kannabiran, Marina Kurkchyan, Simon Mapadimeng, Abdul-mumin Sa'ad, Ayse Saktanber, Celi Scalon, Sawako Shirahase, Grazyna Skapska, Evangelia Tastsoglou, Chin-Chun Yi, Elena Zdravomyslova.

Editor Wilayah

Dunia Arab:

Sari Hanafi, Mounir Saidani.

Argentina:

Juan Ignacio Piovani, Pilar Pi Puig, Martín Urtasun.

Bangladesh:

Habibul Haque Khondker, Hasan Mahmud, Juwel Rana, US Rokeya Akhter, Toufica Sultana, Asif Bin Ali, Khairun Nahar, Eashrat Jahan Eyemoun.

Brasil:

Gustavo Taniguti, Andreza Galli, Ângelo Martins Júnior, Lucas Amaral, Benno Alves, Julio Davies.

India:

Ishwar Modi, Rashmi Jain, Jyoti Sidana, Pragna Sharma, Nidhi Bansal, Pankaj Bhatnagar.

Indonesia:

Kamanto Sunarto, Hari Nugroho, Lucia Ratih Kusumadewi, Fina Itriayati, Indera Ratna Irawati Pattinasarany, Benedictus Hari Juliawan, Mohamad Shohibuddin, Dominggus Elcid Li, Antonius Ario Seto Hardjana.

Iran:

Reyhaneh Javadi, Abdolkarim Bastani, Niayesh Dolati, Marjan Namazi, Vahid Lenjanzade.

Jepang:

Satomi Yamamoto, Yutaro Shimokawa, Shinsha Kameo, Mizuki Ichikawa, Hayato Ishihara, Hiroki Kawabata, Hiromi Murakami, Kenta Kajitani, Kento Kusudo, Hirotaka Tanaka, Chiye Yamada.

Kazakstan:

Aigul Zabirova, Bayan Smagambet, Adil Rodionov, Gani Madi.

Polandia:

Jakub Barszczewski, Adrianna Drozdowska, Krzysztof Gubański, Justyna Kościńska, Kamil Lipiński, Mikołaj Mierzejewski, Karolina Mikołajewska-Zajac, Adam Müller, Zofia Penza, Teresa Teleżyńska, Anna Wandzel, Justyna Zielińska, Jacek Zych.

Rumania:

Cosima Rughiniș, Corina Brăgaru, Nicoleta-Mădălina Ailincăi, Costinel Anuța, Adriana Bondor, Alexandra Ciocănel, Tatiana Cojocari, Andrei Dobre, Iulian Gabor, Ștefania Cristina Ghio-canu, Alexandra Isbășoiu, Rodica Liseanu, Mădălina Manea, Anca Mihai, Andreea Elena Moldoveanu, Rareș-Mihai Mușat, Oana-Elena Negrea, Mioara Paraschiv, Ion Daniel Popa, Ioana Silistraru, Eliza Soare, Adriana Sohodoleanu, Diana Tihan, Elena Tudor, Carmen Voinea, Raisa-Gabriela Zamfirescu.

Rusia:

Elena Zdravomyslova, Anna Kadnikova, Asja Voronkova.

Taiwan:

Jing-Mao Ho.

Turki:

Gül Çorbacıoğlu, İrmak Evren.

Konsultan Media: Gustavo Taniguti.

> Dalam Edisi Ini

Editorial: Menoleh ke Belakang, Memandang ke Depan **2**

Sosiologi, Politik dan Kekuasaan: Wawancara dengan Anthony Giddens
oleh Peter Kolarz, Inggris Raya **4**

> STAGNASI EKONOMI YUNANI

Yunani: Sejarah Geopolitik dan Kebangkrutan
oleh Vassilis K. Fouskas, Inggris Raya **8**

Penghematan yang Dikenakan Negara di Yunani
oleh Maria Markantonatou, Yunani **11**

SYRIZA: Dari Subversi ke Pragmatisme
oleh John Milios, Yunani **14**

Pemenang dan Pecundang dalam Krisis Finansial Yunani
oleh Spyros Sakellariopoulos, Yunani **17**

Bailout Yunani sebagai Kejahatan Negara Bersama Korporasi
oleh Stratos Georgoulas, Yunani **19**

> PERJUANGAN UNTUK ABORSI DI AMERIKA LATIN

Aktivisme Aborsi di Era Misoprostol
oleh Julia McReynolds-Pérez, AS **22**

Berbaliknya Hak-hak Aborsi Meksiko
oleh Susana Lerner, Mexico, Lucía Melgar,
Meksiko dan Agnès Guillaume, Perancis **25**

Aborsi sebagai Kekerasan: Perjuangan Peru
oleh Erika Busse, Peru **28**

> ILMU SOSIAL DI DUNIA ARAB

Ilmu-ilmu Sosial di Dunia Arab
oleh Mohammed A. Bamyeh, AS **30**

Infrastruktur Ilmu Sosial Baru di Kawasan Arab
oleh Seteney Shami, Lebanon **32**

Ilmu-ilmu Sosial Arab – Sebelum dan Sesudah Arab Spring
oleh Idriss Jebari, Lebanon **35**

> KOLOM KHUSUS

George Ritzer tentang McDonaldisasi dan Prosumsi
oleh Labinot Kunushevci, Kosovo **38**

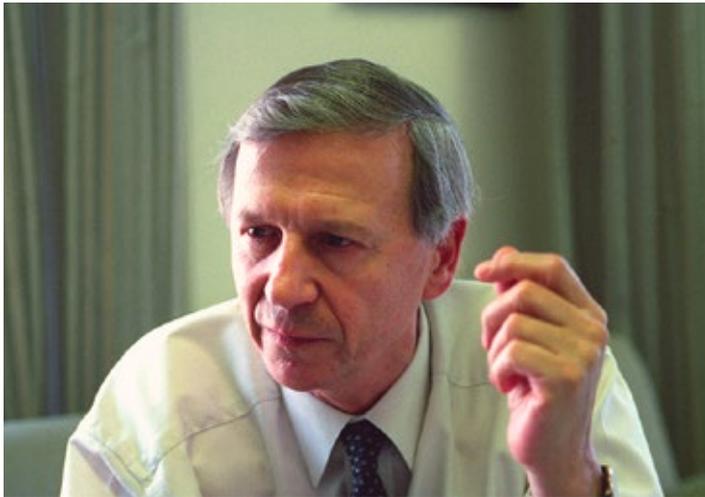
Pojok Sejarah: 40+ Tahun Bersama Sosiologi Internasional
oleh Edward A. Tiryakian, AS **40**

Memperkenalkan Tim Editorial Jepang yang Kedua **42**



> Sosiologi, Politik dan Kekuasaan

Wawancara dengan Anthony Giddens



Anthony Giddens.

PK: Anda telah menulis topik yang sangat luas: teori strukturasi, materialisme historis, modernisme lanjut dan globalisasi, transformasi kehidupan pribadi dan seksualitas, jalan ketiga (*third way*), perubahan iklim, masa depan Uni Eropa, dan akhir-akhir ini mulai memberi ceramah mengenai revolusi digital. Apakah menurut Anda ada benang merah yang mempertalikan kesemua atau sebagian besar kluster dari karya-karya Anda?

AG: Keseluruhan agenda pemikiran saya adalah untuk mencermati hakikat modernitas—kemunculan tatanan industrial dan penyebarannya ke seantero dunia, yang merupakan periode paling revolusioner dan transformatif yang pernah terjadi sejauh ini. Bagi saya, sejarah secara hakiki adalah ketidakberlanjutan: tidak ada model sejarah evolusioner yang pernah berlangsung. Selalu ada orang-orang yang tersituasikan, yang melakukan berbagai hal dalam konteks lingkungan, sosial dan geografis tertentu, yang mengondisikan tindakan yang mereka lakukan, namun di sisi lain dapat mereka tanggap dan bentuk kembali dengan berbagai cara. Saya tidak sependapat dengan pandangan Durkheimian mengenai ilmu-ilmu sosial, di mana kita nampaknya tampil laiknya agen yang pasif daripada sebagai makhluk yang penuh pengetahuan. Erving Goffman—yang bagi saya adalah sosiolog terbesar—menekankan pada sifat ketrampilan dalam apa yang dilakukan manusia dalam kehidupan sehari-hari, tanpa harus selalu mengetahui bahwa mereka melaku-

Anthony Giddens mempelopori kelahiran kembali sosiologi Inggris pada dekade 1970-an dengan sejumlah buku rintisan mengenai teori sosial yang menafsirkan ulang karya-karya klasik untuk era modern. Ia membongkar persoalan agensi dalam suatu dunia yang terstruktur, pertalian antara proses-proses mikro dengan kekuatan-kekuatan makro, dan relevansi globalisasi pada kehidupan sehari-hari. Belakangan ini ia membahas konsekuensi dari revolusi digital dan ancaman perubahan iklim pada eksistensi umat manusia. Giddens adalah penulis lebih dari 30 buku, seorang mantan Direktur dan Profesor Emeritus pada the London School of Economics, dan sejak 2004 merupakan anggota Dewan Bangsawan (*House of Lords*). Pada wawancara berikut ini ia merefleksikan kedudukan sosiologi dalam politik.

Peter Kolarz memperoleh PhD di bidang sosiologi dari Universitas Sussex (Inggris Raya). Beliau adalah seorang konsultan riset kebijakan pada the Technopolis Group dan telah menulis beberapa kajian dan evaluasi kebijakan, termasuk untuk sejumlah kementerian Inggris Raya dan Komisi Eropa. Bukunya yang berjudul *Giddens and Politics Beyond the Third Way: Utopian Realism in the Late Modern Age* (2016) diterbitkan oleh Macmillan Palgrave. Wawancara ini berlangsung di the House of Lord (Inggris Raya) pada tanggal 8 Juni 2016.

kukannya. Ambisi saya adalah untuk mengaitkan perspektif ini pada proses-proses struktural yang lebih makro. Hal ini tidak mudah diwujudkan tapi penting menurut saya, karena banyak sosiologi di masa lalu menampilkan seolah-olah kita hanyalah boneka dari faktor-faktor sosial yang lebih besar. Saya ingin menyingkapkan hubungan-hubungan renik di antara kesemuanya ini. Itulah salah satu alasan mengapa saya selalu tertarik pada transformasi komunikasi dan koneksi. Transformasi kehidupan dan identitas sehari-hari sama pen-

>>

tingnya dengan sistem dan masalah berskala lebih besar yang kita coba hadapi.

PK: Jadi, jika ada satu unsur dalam himpunan karya anda yang akan anda anggap paling penting untuk mewujudkan perubahan sosial dan politik, apakah kiranya hal itu?

AG: Itu merupakan format yang sedang kita bicarakan: sangat reniknya interaksi antara bagaimana orang menciptakan hidupnya sendiri sambil pada saat yang sama merupakan ciptaan dari struktur-struktur lebih besar di mana ia menjadi bagian. Hal ini berlaku di bidang politik maupun di bidang lain. Kebijakan-kebijakan yang mempunyai niat baik tidak pernah memadai, dan sering dapat terpelanting.

PK: Dalam buku saya terbitan tahun 2016 *Giddens and Politics Beyond the Third Way*, saya menggaris-bawahi konsep anda mengenai realisme utopis. Apakah itu suatu pengertian yang masih anda anut?

AG: Realisme utopis merupakan konsep yang masih tetap saya gunakan. Keseluruhan tantangannya adalah bagaimana menautkan idealisme utopis dengan *realpolitik*—yang secara kasat mata nampak berlawanan. Suatu politik yang tanpa gagasan-gagasan ideal akan kehilangan tujuan pengarah. Setiap saat kita harus selalu membayangkan keadaan yang berlawanan dengan kondisi status quo. Pada saat yang sama, gagasan-gagasan ideal pada dirinya sendiri adalah kenyataan yang hampa. Pemikiran mengenai realisme utopis bagi saya merupakan cara yang berguna untuk membuat kita peka terhadap peran gagasan ideal—untuk melampaui kedisinian (*the here*) dan kekinian di satu sisi—namun sekaligus juga untuk menyadarkan kita bahwa hal-hal ideal itu di sisi yang lain harus berpijak kuat pada realitas. Konsep realisme utopis itu adalah alat untuk membuat peka pemikiran mengenai politik dan dunia. Dalam politik demokratis, sebuah partai yang mengabdikan diri hanya untuk memenangkan pemilu pada kenyataannya tidak akan pernah berhasil memenangkannya. Demikian pula tidak akan pernah menang mereka yang memiliki impian-impian mulia namun gagal memperlihatkan bagaimana hal itu menjawab inti sari kepedulian dan aspirasi rakyat. Memang sangat sulit untuk menyelesaikan masalah rumit ini, sebagaimana kita semua maklumi.

PK: Terkait karya politik anda pada tahun 1990-an mengenai globalisasi dan jalan ketiga, apa penilaian anda jika mencermati lanskap politik dan kebijakan dewasa ini? Adakah sesuatu dari debat itu yang sekarang anda anggap tetap penting saat ini tetapi yang belum ditangani secara memadai?

AG: Sulit untuk mengingatnya saat ini, namun pada waktu itu pengertian globalisasi—yaitu meningkatnya ketergantungan di antara individu-individu, organisasi-organisasi dan negara-negara di seluruh dunia—cukup baru, khususnya dalam suatu konteks politik. Mendorong para pemimpin politik untuk menanggapi globalisasi secara serius pada

awalnya cukup sulit. Mereka hanya memandang saya dengan tatapan kosong. Tiba-tiba segalanya berubah secara mendadak. Anda kini tidak akan dapat membuat mereka berhenti membicarakannya, meski hal itu sering dibicarakan pada taraf yang sangat bersahaja. Sayangnya, kebanyakan politisi dan juga ilmuwan sosial menggunakan istilah ini terutama, atau sepenuhnya, untuk mengacu pada penyebaran pasar global. Di atas segalanya, kekuatan pendorong globalisasi dahulu maupun sekarang—dengan kemajuan luar biasa dari revolusi digital—adalah komunikasi, khususnya komunikasi elektronik.

Saya dahulu memakai istilah “jalan ketiga” dengan agak enggan. Bagi saya, istilah itu bukan bermakna pengembangan suatu posisi politik “antara” kiri dan kanan, suatu bentuk jalan tengah. Saya juga tidak melihatnya sebagai suatu versi dari neoliberalisme, sebuah keyakinan pada kearifan tak terbatas dari pasar yang tanpa kekangan. Sebagaimana saya tulis dalam buku saya *The Third Way* pada tahun 1998, “regulasi pasar finansial adalah persoalan tunggal yang paling menentukan dalam perekonomian dunia.” Saya dahulu, dan juga sekarang, adalah orang yang meyakini betapa arti penting pemerintah yang aktif—yang meski demikian tidak harus disamakan hanya dengan negara, namun mencakup berbagai agensi yang lebih luas. Saya dulu, dan juga sekarang, adalah orang yang percaya pada pentingnya pengembangan mekanisme-mekanisme tata kelola global, betapapun besar tantangan untuk mewujudkannya.

Bagi saya, ketimpangan adalah benar-benar suatu isu kunci—sebagaimana siapapun yang mau bersusah payah membaca tulisan saya akan dapat melihatnya dengan mudah. Isu ini menjadi kian besar saat ini karena ketimpangan ekstrim yang telah tumbuh pada puncak piramida kekayaan dan kegagalan meningkatkan produktivitas, dan oleh karena itu juga [menaikkan] upah, bagi kebanyakan kelas pekerja pada jenis-jenis pekerjaan jenjang bawah. Buku Thomas Piketty *Capital in the Twenty-First Century* menjadi suatu buku laris sedunia karena berhasil memberikan interpretasi yang kuat mengenai alasan-alasan struktural yang telah melahirkan disparitas yang sangat mencolok ini, di samping beberapa kemungkinan strategi untuk menguranginya.

Namun tentu saja politik berskala nasional, sementara dunia bersifat global. Jadi selalu tersisa satu hal kunci: kita masih memiliki isu mengenai bagaimana dapat menyelaraskan politik nasional dengan suatu dunia yang secara hakiki bersifat global. Sebagian besar sumber-sumber populisme berasal dari kesulitan-kesulitan semacam ini dan dari kenyataan bahwa siapapun tahu bahwa para politisi nasional tidak mempunyai kekuasaan yang selalu mereka klaim mereka miliki.

PK: Apakah Anda melihat adanya cara untuk menerosos keterputusan antara politik nasional dan transformasi dan ketimpangan global?

AG: Ya, harus ada satu cara, dan dalam buku saya mengenai Eropa¹ saya menyampaikan mengenai keperluan untuk menangani secara terkoordinasi persoalan pelarian

>>

pajak dan mencoba membalikkan proses deindustrialisasi pada perekonomian Barat, mendorong penciptaan kembali manufaktur, kendati dalam bentuk yang cukup berbeda dengan di masa lalu. Hal ini berhimpitan dengan revolusi digital karena sekali uang berwujud elektronik maka ia dapat dipindahkan ke segala sudut dunia secara dengan segera—salah satu faktor yang membantu lahirnya tempat perlindungan pajak. Namun bersama dengan itu kini menjadi lebih sulit untuk dapat menyembunyikan pusaran uang korupsi dalam jumlah besar ke seluruh dunia dibanding dengan di masa lalu. Saya kira opini publik global juga telah menentang keras anggapan bahwa kamu dapat begitu saja menyembunyikan kekayaan dalam jumlah besar pada tataran global dan berharap tidak ada seorangpun yang akan mempedulkannya.

Kendati sejauh ini tata kelola global yang efektif (apalagi yang demokratis) masih jauh panggang dari api, namun kita telah memiliki berbagai agensi, kelompok bangsa dan organisasi internasional yang mencoba bekerja bersama-sama untuk mengatasi berbagai masalah global. Akan sangat menarik untuk melihat apa yang bakal terjadi sebagai hasil dari kesepakatan Paris mengenai perubahan iklim: akankah hal itu omong kosong belaka atautkah sebaliknya? Kita belum mengetahuinya saat ini, namun kesepakatan itu jelas sangat berbeda dengan apapun yang pernah disepakati sebelumnya di atas kertas. Anda bisa melihat bahwa kesepakatan itu telah secara nyata telah berpengaruh besar pada posisi industri bahan bakar fosil, seperti penurunan nilai saham mereka. Setidaknya terdapat kemungkinan bahwa revolusi global yang sesungguhnya dalam energi karbon rendah sedang berlangsung dan suatu pertanyaan mendasar adalah seberapa cepat atau lambatkah hal itu akan terjadi. Marx terkenal dengan pernyataannya bahwa “segala yang kokoh akan mencair ke udara,” dan agaknya perubahan itu merupakan satu versi dari prinsip ini; kita lihat saja nanti. Gelombang baru globalisasi, yang diciptakan oleh revolusi digital yang berkembang dengan kecepatan, cakupan dan laju yang amat mencengangkan, merupakan faktor yang berpengaruh besar di sini.

PK: *Ini merupakan tema yang sering mengemuka dalam karya anda: globalisasi sebagai penciptaan waktu dan ruang, yang ditimbulkan oleh teknologi informasi dan komunikasi, dan berbagai risiko dan peluang yang menyertainya. Menurut anda mungkinkah mengarahkan berbagai perkembangan ini, atau “berselancar bersama arus deras globalisasi” seperti yang pernah anda katakan, dengan suatu cara yang kurang lebih bersifat konstruktif, atautkah kita hanya sebatas “mengikutinya” saja dan melihat apa yang akan terjadi nanti?*

AG: Internet merupakan fenomena luar biasa dari segi dampak yang ditimbulkannya. Ia benar-benar bersifat global yang melampaui segala hal yang pernah kita antisipasi. Ia mengaitkan segala yang intim dari diri kita hingga menyebar ke ranah global. Namun hal ini hanyalah satu elemen saja dari revolusi digital yang dipahami secara

memadai. Hal-hal lain adalah komputer super dan robotik. Saya pernah melihat komputer super sebagai mesin utama penyambung jejaring, namun smartphone di saku anda jauh lebih perkasa dibandingkan sebuah komputer super beberapa dekade yang lalu. Kekuatan algoritma yang demikian besar ini kini tersedia bagi pengguna secara umum, di samping bagi organisasi, bisnis dan negara. Hampir semua aspek masyarakat modern dipengaruhi dan ditransformasikan oleh kekuatan ini. Inilah dunia di mana hampir segala hal tampak kasat mata bagi semua orang karena smartphone telah menyebar secara luas bahkan hingga pada masyarakat paling miskin di dunia. Banyak di antara migran yang meninggalkan wilayah-wilayah penindasan untuk mencari tempat pengungsian ke mana-mana menggunakan smartphone dan GPS untuk melacak rute yang mereka tuju. Migrasi abad ke-21 ini—sebagaimana halnya ISIS, yang menggabungkan tingkat kekerasan abad pertengahan dengan penguasaan teknologi digital, merupakan terorisme abad ke-21.

Banyak orang memandang bahwa revolusi digital menghasilkan sebuah dunia yang terfragmentasi, namun kebanyakan inovasi di bidang ini dirintis oleh intervensi negara, seringkali dengan tujuan-tujuan semi-militer. Internet tampaknya hanya bersifat sementara, namun ia memiliki eksistensi fisik dalam bentuk bentangan kabel di bawah samudera dan satelit di angkasa—benda-benda yang pada akhirnya dijamin oleh negara dan kekuasaannya. Jadi menurut saya kebangkitan geopolitik bukanlah mengagetkan sebagaimana yang lainnya. Korporasi-korporasi raksasa dan pesan iklan yang hadir di setiap sudut juga merupakan kekuatan pengarah. Ini adalah sebuah lingkungan baru, dan banyak perubahan yang memengaruhi kita yang tidak dijabatani oleh proses politik melainkan oleh kekuasaan, baik hal itu berasal dari negara maupun korporasi raksasa. Tidak seorang pun yang pernah memberi suara persetujuan untuk sebuah dunia di mana pornografi tersedia secara “bebas,” dalam kedua pengertian istilah tersebut. Ia mungkin tidak merusak, atau bisa jadi sebaliknya. Kita tidak tahu karena semua ini sama sekali baru.

PK: *Jika demikian, mari kita bahas perpolitikan hari ini: apakah anda melihat saat ini ada banyak debat konstruktif yang berlangsung mengenai masa depan politik kiri?*

AG: Kita harus memperjuangkan dan menjalankan satu versi baru dari kiri-tengah yang secara sosiologis bertolak dari perubahan dalam susunan masyarakat dunia dan dalam kehidupan sehari-hari yang baru saja saya singgung. Perdebatan jalan ketiga muncul dari analisis mengenai perubahan-perubahan besar yang mentransformasikan kehidupan kita pada masa itu, dan kita harus melangkah melalui cara yang sama pada saat ini. Kita harus melihat perubahan besar di dunia, mencermati apa daya tarik yang dapat seseorang peroleh darinya secara politik, dan menemukan bagaimana hal itu berkesesuaian dengan kerangka politik nasional dan internasional. Apa yang terjadi dalam Partai Buruh dengan kemenangan Jeremy Corbyn bagi saya merupakan sebuah hibrida—generasi digital yang lebih

>>

muda terlibat langsung, namun dengan gagasan-gagasan yang sebagiannya berasal dari tahun-tahun di masa silam.

Kita yang ada di garis kiri harus beranjak lebih maju ke masa depan. Kita sekarang sudah jauh melewati periode debat jalan ketiga, dan gagasan-gagasan baru sangatlah dibutuhkan. Saya juga menentang gagasan bahwa segala hal tampaknya hanya menjadi kian terfragmentasi—saya rasa hal itu tidak benar. Anda masih harus berhadapan dengan politik kekuasaan, anda masih harus menangani isu-isu besar seperti bagaimana kita dapat mencapai masyarakat yang lebih egalitarian dalam konteks korporasi global, bagaimana kita dapat memperbaiki capaian yang diperoleh dengan susah payah namun berakhir dalam perlarian pajak? Jadi, kekuasaan masih sangat menentukan. Kolaborasi antar-negara dan karenanya juga politik demokratis di dalam negara, dan di dalam Uni Eropa (EU), masih sangat menentukan.

PK: Ini mengantar saya pada pertanyaan penghujung. anda, lebih berhasil dibanding kebanyakan orang, beralih dari dunia akademik ke politik formal. Saya sudah lama ingin mendengar pandangan anda mengenai menjadi seseorang sosiolog dalam kancah politik, dan terkait ini, apakah anda memiliki saran khusus bagi ilmuwan sosial yang mencoba memastikan karya mereka memiliki daya tarik politik, mereka yang barangkali tertarik untuk memengaruhi sesuatu yang berlangsung dalam arena semacam ini.

AG: Ya, saya memang berada dalam politik namun bukan sosok politik. Saya adalah seorang akademisi dan tetap akademisi. Bagi saya lingkungan terbaik adalah universitas karena di situlah tempat di mana saya paling merasa nyaman, dan seperti saya telah coba tekankan, gagasan dan penelitian yang membumi memiliki arti sangat besar dalam ranah politik. Salah satu masalah utama bagi akademisi yang terlibat dalam politik adalah bahwa anda dapat kehilangan persentuhan dengan konstituen anda di dua arena itu. Bagi kalangan akademisi, anda telah mengkhianati obyektivitas ilmiah anda, sementara bagi politisi anda adalah seseorang yang tidak berpegang pada tuntutan

kehidupan politik sehari-hari. Anda dapat dengan sangat mudah terdampar di antara dua dunia itu.

Dunia akademik dan politik sangatlah berbeda dan tidak banyak orang yang mencoba menjembatani keduanya secara langsung. Kelompok pakar (*think tank*) memainkan peran perantara yang penting antara dunia akademik dan politik. Mereka secara mendasar sangat tergantung pada penelitian yang dilakukan di universitas. Mereka bergulat dengan urusan menerjemahkan penelitian akademis ke dalam saran kebijakan praktis—dan memiliki keterkaitan yang lebih erat dengan media ketimbang yang dimiliki akademisi. Organisasi *think tank* yang terkemuka sering memiliki hubungan erat dengan pemerintah yang berkuasa atau dengan aktor-aktor politik dalam spektrum yang lebih luas. Saya tidak mengatakan bahwa inilah satu-satunya jalur, namun ketika saya memutuskan untuk lebih terlibat secara langsung dalam politik pada pertengahan 1990-an saya mendekati *Institute for Public Policy Research* (IPPR) di mana satu-dua orang akademisi yang saya kenal telah terlibat di dalamnya. Dari situ saya memperoleh kemungkinan untuk mengembangkan jaringan lebih luas dengan orang-orang di kancah politik. IPPR dan jaringan lebih luas di sekitarnya memiliki hubungan yang baik di negara-negara lain, termasuk di AS. Meski demikian, saya tidak pernah menjadi penasehat politik formal bagi siapapun, dan terus menganggap diri saya terutama sebagai seorang akademisi. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Anthony Giddens <Ax.Giddens@lse.ac.uk> dan Peter Kolarz <kolarz.peter@gmail.com>

¹ Giddens, A. (2014) *Turbulent and Mighty Continent* (second edition). Cambridge: Polity.

> Yunani: Sejarah Geopolitik dan Kebangkrutan

oleh **Vassilis K. Fouskas**, Universitas London Timur, Inggris Raya

Kebangkrutan lebih melambangkan sejarah Yunani daripada Cakram. Ilustrasi oleh Arbu.

Didirikan pada tahun 1830 di kerucut Selatan Semenanjung Balkan yang meliputi Peloponnese, Rumelia bagian Selatan, Euboea dan kompleks kepulauan Cyclades, negara Yunani dihasilkan dari suatu kecelakaan geopolitik imperial, bukan dari kelompok borjuis industri nasional yang berkembang secara ekonomi. Alih-alih mencerminkan proses revolusi nasional yang digerakkan modal industri melawan mode produksi feodal - seperti yang terjadi, misalnya, dengan Junkers [aristokrat] Prusia atau di kawasan Piedmont, Italia - sebuah negara Yunani yang terbatas dirasakan oleh kekuatan imperial Barat sebagai kebutuhan geostrategis, sebagai bagian dari upaya untuk mencegah perluasan wilayah Rusia dan Mesir di Mediterania Timur. Faktor geopolitik merupakan hal paling utama bagi berdirinya Yunani - dan pada waktu ini, pertanyaan-pertanyaan geopolitik / geostrategis merupakan pertanyaan yang sangat penting dalam memahami asal-usul historis dari krisis utang Yunani. Sejak berdirinya negara Yunani modern, posisi penting geografis Yunani telah dimanfaatkan oleh Barat, bukan untuk kepentingan masyarakat Yunani, tetapi untuk keuntungan mereka sendiri.

> Keterikatan Abad Kesembilan Belas pada Keuangan Global

Dalam rangka melakukan perang kemerdekaan melawan kekuasaan Ottoman, elit Yunani meminjam uang dalam jumlah besar dari Barat. Pada tahun 1820-an, Yunani menerima dua pinjaman sebesar masing-masing £ 800.000 dan £ 2 juta. Aparatur negara Yunani yang primitif mengalami kebangkrutan pertama di 1824-1825, ketika tidak bisa lagi membayar bunga pinjaman dari Perancis dan Inggris. Di tahun 1832-1833 pinjaman lain sebesar 60 juta (dalam emas franc) ditandatangani dan seluruhnya digunakan untuk membiayai pemerintahan dan pemeliharaan tentara. Pinjaman tersebut menghasilkan kebangkrutan Yunani berikutnya pada tahun 1843.

Antara tahun 1827 dan 1877-1878, Yunani dikeluarkan dari pasar finansial Barat. Selama lima dekade tersebut dan setelahnya, pemerintah beralih (meskipun cenderung gagal) untuk melakukan pinjaman internal di samping mendorong proyek-proyek investasi dari diaspora orang kaya Yunani, yang memiliki modal komprador, bersama-sama dengan kelas pedagang Yahudi dan Armenia, yang menonjol di imperium Ottoman. Dengan rendahnya tingkat perkembangan industri, dan ketidakmampuan dalam mengejar skala ekonomi karena ukurannya yang kecil, sepanjang abad kesembilan belas Yunani ditandai oleh ekonomi periferi yang terbelakang dan pemerintahan yang sangat tergantung; pada tahun 1893, Yunani dinyatakan bangkrut lagi.

Namun, meskipun keuangannya bobrok dan sektor perbankan dan industrinya tidak canggih, Yunani selalu dipandang oleh kekuasaan Barat melalui prisma kepentingan geopolitik imperial mereka. Setelah imperium Austro-Hungaria dan Ottoman mundur, ruang baru terbuka untuk imperialisme Rusia dan Eropa Barat, yang kini diperbaharui dengan aktor-aktor baru seperti Jerman dan Italia. Negara-negara mikro Kristen Balkan menawarkan kepada Barat peluang

peluang istimewa, dengan memberikan bantuan dalam perang yang sedang berlangsung melawan Turki Ottoman. Pada akhir Perang Dunia Pertama, orang-orang Ottoman didorong keluar dari Eropa, dan perbatasan Balkan / Eropa Timur dan Timur Dekat/Timur Tengah ditata ulang.

Dengan menaklukkan wilayah dan menguasai penduduknya – yang tidak semuanya terdiri atas orang Yunani - Yunani menyaksikan kegiatan industri substantif dalam dua dekade pertama abad kedua puluh di bawah kepemimpinan liberal-nasionalis Eleftherios Venizelos. Dengan dukungan Inggris, Venizelos memimpin perang proxy yang gagal melawan kekuatan pasukan Kemalis-nasionalis di Asia Kecil. Dampaknya merupakan bencana total bagi Yunani maupun Turki modern. Meskipun Yunani menyaksikan arus masuk sekitar 1.4 juta pengungsi Kristen, Yunani mencapai puncak homogenitas etnis untuk pertama kali dalam sejarahnya semantara Turki, setelah kehilangan kelas pedagang yang paling gigih, sangat bergantung pada pembangunan ekonomi bentuk otoriter yang dipimpin negara, dan gagal untuk membentuk homogenitas etnis atau agama.

Tanpa suatu basis ekonomi yang kokoh, dan dengan elit politik berkuasanya yang bekerja sama dengan kepentingan imperial, Yunani tidak bisa memanfaatkan keuntungan geostrategisnya. Jadi, alih-alih berfungsi sebagai aset, lokasi geografisnya justru menjadi beban permanen. Ini terwujud langsung dalam bentuk masalah neraca pembayaran yang, ditambah dengan keperluan pinjaman internal yang konstan untuk mendanai mesin negara yang klientelistik dan korup, berulang kali menyebabkan utang yang tidak tertangani.

> Krisis Keuangan Tahun 1929 dan Akibatnya

Sesudah krisis keuangan global tahun 1929, Yunani mengalami kebangkrutan keempat pada tahun

1932. Setelah itu, diktator Ioannis Metaxas memberlakukan kebijakan industrialisasi substitusi impor, secara substansial meningkatkan neraca pembayaran negara. Selain itu, di kala obor imperial beralih ke hegemoni global baru, Amerika Serikat, Perang Dingin memproduksi dividen: arti penting geopolitik Yunani menjamin masifnya modal dan pinjaman Amerika sambil memarginalkan kekuatan komunis kiri domestik Yunani selama "Zaman Keemasan kapitalisme."

Namun, sekali lagi, Yunani tetap berada di periferi dan sangat tergantung. Secara khas, pada 1960-an, ketika Gubernur Bank Yunani (*Bank of Greece*), Xenophon Zolotas menemui duta besar AS di Athena untuk meminta pinjaman, duta besar itu menjawab dengan merujuk pada suatu konflik geopolitik. Secara efektif, duta besar mengatakan bahwa jika ingin mendapatkan pinjaman, Yunani harus menerima rencana Dean Acheson [Menteri Luar Negeri AS] bagi Siprus – suatu rencana yang secara diam-diam dinegosiasikan antara kekuatan-kekuatan NATO yang mengusulkan pembagian pulau antara Yunani dan Turki, dengan menyisihkan Uskup Agung Makarios, yang pada waktu itu merupakan pemimpin terpilih Siprus dan seorang pendiri gerakan non-blok. Dengan demikian, isu geopolitik dan masalah utang ditangani melalui suatu pertukaran langsung. Sedemikian pentingnya Siprus bagi NATO dan Barat sehingga Amerika Serikat, melalui CIA, menghasut terjadinya suatu diktatur militer di Yunani; demokrasi baru dapat dipulihkan kembali pada tahun 1974, ketika Siprus dibagi dua.

Dari tahun 1950-an sampai pertengahan 1970-an, Yunani tidak berhasil mengejar ketertinggalannya dengan [negara-negara] Barat inti. Namun selama periode ini - dan bertentangan dengan kebijakan Barat Keynesian yang berbasis permintaan (*demand-led policies*) - Yunani memberlakukan kebijakan yang di kemudian hari akan disebut sebagai neo-liberal. Pembangunan ekonominya merupakan ekonomi berbasis pena-



waran dan bersifat pro-moneteris, untuk sebagian besar karena politik Perang Dingin. Meskipun Komunis Kiri yang pro-Soviet telah dikalahkan selama Perang Saudara (1944-1949), mereka masih menikmati dukungan populer yang luas, yang berarti bahwa pemerintah konservatif takut pada setiap upaya untuk membuka politik dalam masyarakat sipil. Baik partisipasi politik maupun kebijakan ekonomi berbasis permintaan tetap stagnan sampai tahun 1974.

Tetapi setelah 1974, kabinet-kabinet Yunani berturut-turut di bawah Constantine Karamanlis (1974-1981) yang sayap kanan dan sosialis Andreas G. Papandreu (1981-1989, 1993-1996) menggeser kebijakan pembuatan keputusan Yunani ke dalam suatu siklus permintaan, mengisi mesin negara dengan personel politik partai mereka, menasionalisasi perusahaan-perusahaan swasta besar dan, khususnya di tahun 1980-an, membiayai negara kesejahteraan Yunani melalui peminjaman yang mencurigakan (baik eksternal dan internal) daripada melalui pajak. Bahkan di kala memasuki Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) pada tahun 1981, Yunani terus menerapkan kebijakan berbasis permintaan pada saat sebagian besar Barat sudah bergeser untuk menerapkan globalisasi neoliberal/ finansialisasi.

Secara terus menerus pertim-

banan geopolitik mengemuka: Yunani diterima di EEC lima tahun lebih dahulu dibandingkan dengan Portugal dan Spanyol sebagai bagian dari suatu strategi untuk menstabilkan sisi Selatan NATO, pada suatu masa di mana investasi modal tetap Amerika di Yunani sedang menyusut. Pada 1980-an, modal Jerman dan Perancis semakin mendominasi perekonomian Yunani, dan mendorong negara tersebut untuk mengadopsi suatu agenda neoliberal sehingga bisa menggunakan Yunani sebagai suatu landasan peluncuran untuk menyebarkan jasa keuangan di seluruh Balkan.

> Memburuknya Situasi Ekonomi di Eurozone

Selama dua dekade berikutnya, dan terutama setelah masuknya negara ke dalam *eurozone* [negara-negara kawasan Uni Eropa yang menggunakan Euro sebagai mata uang nasionalnya] pada tahun 2001, posisi kompetitif Yunani memburuk secara tajam. Industri yang biasanya mencekak laba, seperti tekstil, menghilang. Jasa keuangan dan perbankan mendominasi ekonomi Yunani, menyebar ke Balkan dan Timur Dekat. Aset publik diswastakan satu demi satu. Ketergantungan negara pada pinjaman eksternal dan domestik meningkat sedemikian tinggi sehingga, mengingat terbukanya aset publik bagi akuisisi modal asing dan hilangnya kedaulatan moneter, orang berta-

nya-tanya apakah istilah "ketergantungan" cukup menjelaskan posisi ekonomi global negara itu.

Ketika krisis keuangan global menetes ke *eurozone*, Yunani paling menderita, karena dia merupakan tautan terlemah dari rantai finansial dalam akumulasi modal neo-imperial. Dua puluh tahun sejak finansialisasi neoliberal, yang diikuti oleh langkah-langkah penghematan akut dan perjanjian *bail-out*, tidak memecahkan satu pun dari masalah-masalah ekonomi dalam sejarah Yunani: keterbelakangan industri; lemahnya kelembagaan; defisit transaksi berjalan yang masif dan utang yang tinggi untuk rasio PDB; defisit anggaran yang besar dan masalah fiskal. Yang dibutuhkan adalah investasi publik yang kokoh, suatu upaya untuk membangun sektor industri dan pertanian baru yang berdasarkan produksi yang sesuai, seperti energi surya dan pertumbuhan hijau. Pada saat yang sama, kebijakan luar negeri yang mandiri bisa mengambil keuntungan dari posisi geostrategis negara dan misi damai di Balkan dan Timur Dekat (*Near East*) yang bergolak. Jika hal ini tidak dapat terjadi dalam *eurozone* seperti yang terstruktur saat ini, maka yang bermasalah *eurozone*, bukan Yunani. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Vassilis Fouskas <v.fouskas@uel.ac.uk>

> Penghematan yang Dikenakan Negara di Yunani

oleh **Maria Markantonatou**, Universitas Aegean, Yunani



Seorang pedagang kaki lima mengumpulkan pakaian miliknya di luar pintu geser sebuah toko di pusat kota Athena.
Oleh Petros Giannakouris/AP Photo.

Sejak didirikan, zona Euro [*eurozone*, kelompok negara Uni Eropa yang menggunakan Euro sebagai mata uang nasionalnya] telah mengikuti usulan yang dipengaruhi oleh ekonom liberal besar Friedrich Hayek, terutama perlindungan kebijakan moneter dan fiskal dari [campur tangan] politik nasional dan dengan demikian dari proses dan kontrol demokratis. Proyek ini telah direalisasikan melalui bank sentral yang seharusnya independen dan sebuah kerangka kelembagaan yang memerlukan perekonomian yang heterogen untuk mematuhi peraturan-peraturan ketat mengenai mata uang-bahkan jika, seperti dalam era standar emas, peraturan-peraturan ini tidak memberikan keuntungan setara bagi semua negara. Orientasi pasar zona Euro telah menjadi lebih jelas sejak awal krisis global. Bahkan jika beberapa kekuatan politik dalam proyek integrasi Eropa awalnya mendukung kesejahteraan sosial, sejak tahun 2010 manajemen krisis, terutama terkait dengan Yunani, telah memberi sinyal kekalahan visi tentang “Eropa yang bersifat sosial” (*social Europe*).

Sejak 2010, suatu liberalisme ekonomi yang berhaluan keras (*hard-core*) telah diberlakukan di Yunani, dimulai dengan eksklusi negara dari pasar internasional. Selama enam tahun, pemerintah-pemerintah dengan berbagai orientasi politik (sosial demokrat, sayap kanan, sayap kiri, teknokrat, sementara dan koalisi) telah secara tergesa-gesa memaksakan berlusin-lusin undang-undang dan peraturan baru dalam kerangka apa yang dinamakan “Memorandum Kesepakatan” (*memorandum of understanding*), serangkaian perjanjian antara Yunani dan para kreditor internasionalnya. Agar Yunani dapat memperoleh akses ke pinjaman untuk dapat menyelesaikan kewajiban pembayaran dan utangnya, langkah-langkah penghematan (*austerity*) telah dikenakan, bersama-sama dengan perundang-undangan yang ramah bisnis, privatisasi, dan semakin menyusutnya Negara Kesejahteraan Yunani-yang sudah menyusut sejak pertengahan 1990-an.

Dimulai dengan Memorandum I, sampai dengan Memorandum III sekarang, disiplin fiskal telah menjadi doktrin yang baru. Ancaman, tekanan dan terorisme psikologis

secara kurang lebih terbuka oleh para kreditor berkenaan dengan dampak dari kemungkinan "Grexit" (Yunani keluar dari Uni Eropa) telah berhasil diterapkan meskipun berhadapan dengan perlawanan secara intensif yang melibatkan ratusan pemogokan, demonstrasi, protes dan pendudukan (*occupation*), serta gerakan-gerakan sosial dan partai politik baru yang menentang perjanjian penghematan.

Sebagai akibat dari kebijakan penghematan tersebut, sejak tahun 2010 PDB Yunani turun lebih dari 27%, suatu penurunan yang sebanding dengan PDB AS di tahun 1930-an. Standar hidup telah memburuk secara drastis; pemotongan upah dan pensiun telah berkisar antara 20% sampai 50% bersamaan dengan meningkatnya perpajakan darurat; sebagian besar penduduk telah jatuh miskin. Di sektor publik, pengeluaran telah secara cepat dikurangi, ribuan orang dipecat dan penerimaan pegawai baru dibekukan; pada saat yang sama, prosedur jalur cepat memungkinkan pemerintah untuk memprivatisasi banyak aset negara yang masih tersisa. Organisasi-organisasi publik – mulai dari badan usaha milik negara, sekolah, rumah sakit atau bahkan rumah sakit jiwa ditutup atau digabungkan tanpa banyak pertimbangan. Lembaga-lembaga yang tersisa kelebihan beban, dan karenanya tidak dapat memenuhi kebutuhan sosial yang meningkat, sehingga mengakibatkan menurunnya layanan publik secara radikal, termasuk kesehatan, pendidikan dan kesejahteraan sosial.

Dengan pengangguran yang melonjak dari hampir 9% pada tahun 2006 menjadi 27% pada tahun 2014, kelas pekerja Yunani tidak lagi melihat prospek untuk masa depan yang lebih baik: sudah jelas bahwa ekonomi tidak akan membaik dengan segera. Dengan lebih dari setengah dari kaum muda Yunani menganggur, dan dengan meningkatnya kerentanan (*precarization*) kondisi kerja, pendatang baru pasar tenaga kerja menghadapi persoalan yang berat. Keluarga kurang mampu untuk mendukung anak-anak dan orang usia lanjut karena pemotongan upah dan pensiun-menantang model kekeluargaan (*familistic*) Yunani dan sisa negara kesejahteraan yang belum pernah sepenuhnya berkembang seperti di Eropa Utara. Walaupun model kekeluargaan ini kadang dianggap sebagai suatu gejala kapitalisme yang terbelakang – suatu pandangan yang tercermin dalam reformasi "modernisasi" yang ditetapkan dalam Memorandum Uni Eropa-saat ini, tidak ada bukti bahwa Yunani bergerak ke arah jenis negara kesejahteraan Eropa manapun. Dengan memperlakukan model kekeluargaan Yunani dan sisa negara kesejahteraan sebagai hal yang memerlukan "reformasi," para kreditor telah menuntut diterapkannya deregulasi dan pergeseran ke suatu model pasar – yang berarti bahwa pada waktu ini, perlindungan sosial hanya tersedia bagi mereka yang mampu membelinya.

Deregulasi ini bukan hasil dialog antara aktor sosial atau

suatu kesepakatan sosial. Keputusan-keputusan nasional dan supranasional yang diambil dengan cara yang tidak transparan melalui "prosedur darurat" – mewakili prioritas para kreditor dan kaum elit domestik – telah menyatu selama krisis, mengaburkan garis di antara tugas dan tanggung jawab terkait para aktor politik nasional dan internasional. Para pemilih Yunani telah dieksklusikan dari keputusan politik, konferensi Eurogroup dan Dewan Urusan Ekonomi dan Finansial telah menggantikan fungsi-fungsi parlementer. Diterapkannya suatu "pemerintah teknokratik" pada tahun 2011, dengan seorang bankir internasional yang menjabat sebagai perdana menteri, telah menjadi titik puncak dari proses ini. Sementara itu, perlengkapan yang demokratis dianggap tidak efektif; selama masa krisis referendum dibatalkan atau dianggap batal.

Gagasan Karl Polanyi bahwa pemisahan antara ekonomi dan masyarakat melekat pada liberalisme pasar dijumpai paling nyata di Yunani pada masa kini. Pemisahan ini merupakan bentuk liberalisasi yang dikembangkan oleh intervensi negara. Berbeda jauh dari pengertian yang merupakan kebalikannya, seperti dijelaskan Polanyi, sistem pasar selalu menjadi produk dari intervensi negara yang disengaja. Pola ini nampak secara jelas pula dalam perjanjian-perjanjian nota kesepakatan, yang mungkin merupakan intervensi politik terluas dan paling rinci dalam sejarah Uni Eropa.

Dalam pandangan Polanyi terhadap kapitalisme abad kesembilan belas, kaum liberal menyalahkan krisis atau gangguan pada fungsi pasar yang mengatur sendiri (*self-regulating market*) pada kelompok sosial tertentu. Demikian pula, di Yunani masa kini, pandangan yang berlaku menyalahkan masyarakat sebagai penyebab situasi negara: buruh menikmati upah terlalu tinggi, karyawan publik berjumlah terlalu banyak, tunjangan sosial terlalu murah hati, milik publik terlalu besar. Dengan demikian, penghematan yang diawasi telah ditampilkan sebagai suatu hukuman yang sah, yang dirancang untuk mengakhiri perilaku yang umumnya boros demi membantu pemulihan pasar.

Manajemen krisis Yunani merupakan bagian dari suatu strategi untuk pelembagaan penghematan di seluruh zona Euro. Salah satu instrumennya ialah *Fiscal Compact* [suatu perjanjian fiskal yang mengikat sejumlah besar negara anggota Uni Eropa] yang memberikan kewenangan kepada para pejabat Eropa, yang seharusnya bersifat non-politik untuk meningkatkan pengawasan terhadap anggaran nasional. Tetapi krisis ini mengungkapkan pula cacat struktural dan kelemahan *European Monetary Union* [perjanjian anggota Uni Eropa untuk menggunakan mata uang sama]. Karena perekonomian zona Euro telah mengalami reorientasi ke arah neo-Merkantilisme yang kompetitif, kekuatan-kekuatan ultra kanan dan neo-fasis telah meningkatkan pengaruh terhadap para pemilih mereka. Optimisme terhadap integrasi Eropa telah secara

bertahap dikalahkan oleh seruan politik untuk memperoleh lebih banyak kedaulatan nasional dan negara - konsep yang dianggap usang hanya beberapa tahun yang lalu. Usulan dari kubu yang menganut "lebih banyak Eropa" dan "lebih banyak integrasi politik" sekarang terdengar retorik; kaum elit zona Euro lebih peduli dengan penguatan liberalisme ekonomi, dengan menentang setiap upaya untuk memberikan keringanan penghematan atau disiplin fiskal bagi negara-negara yang berada di bawah program-program penyesuaian struktural, atau untuk meningkatkan dana untuk tenaga kerja dan investasi publik, apa lagi untuk memberikan keringanan hutang.

Penghematan sebagai hukuman (*punitive austerity*), pelembagaan disiplin fiskal dan kolonialisme intra Eropa yang neoliberal telah memperburuk kondisi tenaga kerja dan menciptakan peningkatan kerentanan (*precarization*), peningkatan deregulasi sosial dan ketidakstabilan politik di Yunani dan di tempat lain. Selama tidak ada rencana meyakinkan yang menawarkan jalan keluar dari penghematan, ketiadaan simetri antara perekonomian-perekonomian nasional dan kesenjangan kelas akan meningkat, menguatkan perasaan di antara warga biasa di negara-negara berbeda bahwa keputusan-keputusan kunci akan diambil di tempat lain, oleh elit internasional tertentu yang impersonal; dalam iklim yang demikian, skeptisisme terhadap Eropa (*Euroskepticism*), tuntutan dan argumen anti-globalisasi untuk meniadakan zona Euro akan memperoleh

lebih banyak pendukung. Pertanyaannya adalah, bentuk politik apakah yang akan ditempuh tuntutan dan argumen ini, dan kekuatan sosial apakah yang akan dominan. Apakah mereka yang berjuang untuk demokratisasi dan penghentian neoliberalisme akan menang? Ataukah kaum ultra kanan Eropa akan dapat mempromosikan pembelokan ke suatu nasionalis yang lebih mendalam? Hingga kini, pandangan Polanyi mengenai pendulum "gerakan ganda" (*double movement*) menunjukkan bahwa kekuatan pasar dan wakil-wakil politik mereka telah menang, meninggalkan demokrasi dalam keadaan terkoyak dan meningkatkan prospek skenario masa depan yang gelap. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Maria Markantonatou <mmarkant@soc.aegean.gr>

> SYRIZA

Dari Subversi ke Pragmatisme

oleh **John Milios**, National Technical University of Athens, Yunani



| Demonstrasi SYRIZA di Athena.

SYRIZA dibentuk pada tahun 2004 sebagai koalisi yang cukup longgar, yang melibatkan lebih dari sepuluh aliran sayap kiri dan kelompok-kelompok politik berlainan. Formasinya berkembang dari suatu proses yang dimulai pada tahun 2000, ketika sebagian besar kelompok politik yang kelak membentuk SYRIZA hidup berdampingan dalam gerakan Alter-Globalisasi (*Alter-Globalization Movement*) Yunani dan Eropa. Pada tahun 2001, ribuan sayap kiri Yunani berpartisipasi dalam protes terhadap pertemuan Puncak G8 di Genoa (*Genoa G8-Summit*), mungkin demonstrasi anti-globalisasi

>>

Eropa terbesar; banyak di antara pesertanya merupakan anggota organisasi politik yang kelak membentuk SYRIZA, sebuah koalisi yang muncul sebagai kutub kiri yang tegas dalam kancah politik dan di parlemen Yunani.

Secara historis, SYRIZA berasal dari empat tradisi besar: suatu tradisi komunis (ditandai oleh ketegangan antara kelompok komunis bekas pro-Soviet dan Eropa); tradisi ekstra-parlementer sayap kiri (ditandai dengan ketegangannya sendiri, terutama antara para Trotskyis, Maois dan sub-tradisi radikal komunis Eropa); gerakan 'Alter-Globalisasi' dari awal tahun 2000-an; dan tradisi reformis sosial demokrat Yunani, terutama setelah pemilihan umum tahun 2012 yang sangat penting, waktu partai sosial demokrat Yunani (*Panhellenic Socialist Movement* – PASOK) hancur. Dari 4.6% dalam pemilihan umum nasional tahun 2009, SYRIZA mengalami peningkatan menjadi hampir 27% pada tahun 2012. Sementara itu, PASOK jatuh, menurun dari hampir 44% pada tahun 2009 menjadi 13.8% pada tahun 2012. Semenjak kekuasaan militer berakhir pada tahun 1974, PASOK bergantian berkuasa dengan Nea Demokratia sayap kiri, namun pada Januari 2015, PASOK turun sampai ke 4.6% saja sementara SYRIZA menjadi partai berkuasa dengan lebih dari 36% suara.

SYRIZA terus berkembang. Dari tahun 2012, ketika SYRIZA menjadi partai oposisi utama dalam negara, partai tersebut secara bertahap menganut suatu pendirian reformis, bergeser ke arah "pragmatisme" dan membedakan antara "SYRIZA lama yang 4%" dan "SYRIZA baru yang 27%," dalam periode ini pula, banyak mantan anggota PASOK bergabung dengan SYRIZA. Pada pemilihan umum Parlemen Eropa tahun 2014, SYRIZA memimpin dengan 26.5% dan nampak siap untuk membentuk pemerintahan sebagai mitra utama dalam pemilihan umum nasional mendatang. Sambil menyerukan kepada para anggota partai untuk mempertimbangkan "keefektifan" dan "menjamin kemenangan pemilihan umum," banyak pemimpin SYRIZA mulai main mata dengan politisi pusat-kiri dan formasi politik pusat-kiri yang kecil.

Bahasa resmi partai dalam media massa, slogan-slogannya, dan sasaran-sasaran terdahulunya mulai berubah. Slogannya, "Untuk Pemerintahan Kiri" (*Government of the Left*), telah secara bertahap diganti menjadi suatu yang menggambarkan diri sendiri sebagai "Pemerintahan Penyelamatan Nasional" (*Government of National Salvation*); "Redistribusi Kekuasaan, Kekayaan dan Pendapatan untuk menguntungkan Pekerja" (*Redistribution of Power, Wealth and Income to the Benefit of Labor*) diganti oleh "Rekonstruksi Produktif dari Negara" (*Productive Reconstruction of the Country*). Sikap-sikap yang bersifat programatis – termasuk pengendalian demokratis terhadap masyarakat dan ekonomi oleh rakyat, perkembangan pola produktif kooperasi dan suatu perekonomian sosial non-pasar – dikesampingkan.

Program pra-pemilihan umum SYRIZA menjanjikan berakhirnya kebijakan penghematan dan perjanjian dengan para kreditor negara untuk membiayai sektor publik Yunani; beberapa minggu setelah SYRIZA berkuasa,

janji-janji tersebut bergeser menjadi negosiasi untuk Memorandum yang lebih lunak, dan suatu kesepakatan pendahuluan yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Y. Varoufakis pada Februari 2015. Varoufakis tidak pernah menjadi anggota SYRIZA atau menjadi pendukung suatu aliran sayap kiri; tidak lama setelah masa jabatannya sebagai menteri, ia secara terbuka menjauhkan dirinya dari sikap-sikap programatis SYRIZA. Ia menilai krisis tersebut telah mengakibatkan seluruh kelas sosial menjadi korban secara merata, dengan menyerukan diterapkannya model berorientasi ekspor dan menolak kenaikan gaji karena akan mengurangi daya saing. Dengan demikian pernyataannya yang sering diulang-ulang yang mengklaim bahwa 70% dari ketentuan dalam Memoranda akan menguntungkan Yunani, bukan suatu hal yang kebetulan.

Tetapi, SYRIZA tidak memperoleh kekuasaan dengan berjanji untuk mendukung 70% dari ketentuan-ketentuan Memoranda. Seandainya demikian halnya, SYRIZA mungkin tidak akan dilibatkan dalam peta parlementer Yunani saat ini, apa lagi memainkan suatu peran kunci. Visi yang tercermin dalam pernyataan-pernyataan Varoufakis yang merumuskan ulang mandat SYRIZA, secara praktis merupakan suatu usaha untuk mengubah aliansi sosial yang hingga saat itu telah mendukung eksperimen bersejarah mengenai suatu pemerintahan sayap kiri Yunani.

Persetujuan Februari 2015 menunjukkan secara jelas bahwa pemerintah Yunani sedang bernegosiasi dalam kerangka penghematan neoliberal Eropa, sebatas mencari daun ara [*fig leaf*, berarti: selubung] untuk menyembunyikan kompromi-komprominya. Daun ara ini melibatkan, di satu sisi, suatu program moderat untuk "mengakhiri krisis kemanusiaan" (dengan menyediakan subsidi energi, kupon makanan bagi yang sangat miskin, dan sebagainya) dan, di sisi lain, suatu penolakan terhadap penurunan nominal gaji dan pensiun secara langsung, sambil mempertahankan kondisi kebijakan yang telah ada perihal pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran dan koefisien pajak penambahan nilai (VAT) yang rendah untuk kepentingan bahan pokok konsumen dasar. Pemerintah membatalkan program-program pra-pemilihan umumnya, dan sebagai gantinya mengupayakan suatu perjanjian yang akan mempertahankan keutuhan kerangka institusional neoliberal dan ekonomi Yunani, dengan harapan dapat menghindari langkah-langkah penghematan lebih lanjut bagi yang berpenghasilan rendah dan sedang.

Namun para kreditor tidak pernah menerima usulan-usulan tersebut, dan sebagai gantinya menawarkan suatu rencana untuk membiaya Yunani lebih lanjut melalui kebijakan neoliberal yang lebih mendalam, termasuk meningkatkan pemotongan gaji dan pensiun ("Juncker Plan"). Setelah berunding lima bulan lagi, pemerintah tidak pernah menerima satu pun di antara bagian (*tranche*) yang dijanjikan para kreditornya, meskipun Yunani tetap membayar kewajiban hutangnya kepada Bank Sentral Eropa (*European Central Bank* (ECB)) dan Dana Moneter Internasional (*International Monetary Fund* (IMF)) hingga habisnya semua dana publik, dan perlunya melakukan penundaan pembayaran IMF pada Juni 2015, saat pemerintah kehabisan uang. Pada pekan tersebut Perdana Menteri A. Tsipras menyerukan dilakukan



Alexis Tsipras, yang suatu waktu pernah menjadi idola kaum kiri anti penghematan Eropa

referendum terhadap “Juncker Plan”. Sebagai antisipasi pemungutan suara, Yunani harus membatasi pendebetan dana dari bank-bank Yunani (“bank holiday” dan “capital controls”) di kala ECB menolak meminjamkan uang tunai tambahan kepada bank-bank sementara para depositor yang cemas mendebet tabungan-tabungan mereka.

Kampanye referendum menggarisbawahi pengkotakan kelas dan sosial yang belum pernah terlihat selama berpuh tahun. Dua “Yunani” bertarung satu sama lain: kaum miskin, penerima gaji, penganggur, dan banyak wirausahawan kecil menuntut suara “Tidak,” sementara kelas atas beragitasi untuk suara “Ya.” Dengan ditutupnya bank-bank, propaganda media massa memperingatkan bahwa suara “Tidak” akan memicu kehancuran, sementara para majikan menekan para pekerja untuk memberikan suara “Ya;” meskipun demikian, hampir dua per tiga orang Yunani (61.3%) menyuarakan “Tidak.” Tetapi dalam parlemen, pemerintah mengubah suara “Tidak” menjadi “Ya,” dengan bekerjasama dengan oposisi konservatif. Pada Juli 2015, saat SYRIZA menandatangani Memorandum baru yang nyaris menduplikasi “Juncker Plan” dan digambarkan sebagai hasil pemerasan, suatu kekalahan dalam perjuangan antara Yunani, para kreditornya, dan kaum elit Eropa yang dogmatis.

Interpretasi ini menggaungkan suara-suara dalam SYRIZA yang memandang Memoranda baik sebagai suatu kesalahan ekonomi yang tidak akan meningkatkan pertumbuhan, maupun sebagai suatu serangan terhadap Yunani oleh “kepentingan-kepentingan asing.” Dengan demikian, kapitulasi terakhir SYRIZA disajikan dalam bentuk apa yang oleh beberapa anggota partai dianggap sebagai “kejatuhan heroik dalam suatu pertempuran yang tidak seimbang,” yang dapat dibalikkan di masa depan melalui langkah-langkah pemerintah yang setara, seperti usaha memberantas korupsi dan modernisasi struktur negara. Namun, penghematan tidak hanya merupakan suatu “kebijakan palsu” melainkan suatu strategi kelas untuk mempromosikan kepentingan modal di atas kepentingan para pekerja, penganggur, pensiunan, dan mereka yang secara ekonomi rentan; penghematan tersebut menawarkan lebih sedikit hak bagi buruh, perlindungan sosial yang lemah, dan kelenturan pada gaji rendah, serta ketiadaan daya tawar yang berarti.

Di luar batas-batas tertentu, penaklukan seluruh bagian kehidupan sosial terhadap pasar yang tak terkekang dapat menyebabkan risiko politik bagi tatanan neoliberal, sebab hal tersebut dapat memicu terjadinya protes sosial yang tak terkendali. Risiko politik ini pernah menjadi senjata kuat, di kala kelas pekerja Yunani dan SYRIZA berupaya untuk menghentikan penghematan. Namun senjata tersebut bergantung pada sebuah prasyarat: bahwa SYRIZA akan berpegang pada programnya, dan mempertahankan prioritasnya, lebih mengutamakan rakyat daripada laba.

Tetapi strategi ini telah ditinggalkan sejak kemenangan Parlemen Eropa dalam pemilihan umum pada tahun 2014, pada waktu SYRIZA berpaling ke suatu jalan reformis-neoliberal sebagai suatu prasyarat untuk “pertumbuhan dan stabilisasi.” Akar dari pergeseran ini tidak hanya terletak pada tantangan baru di kala SYRIZA menjadi suatu partai yang berkuasa, tetapi juga dalam tradisi politik kiri pasca-Stalinisme Yunani. Reformasinya yang patriotik ditandai oleh *governmentalism* – yaitu, ide bahwa membentuk pemerintahan sayap-kiri adalah kondisi yang memadai dan cukup untuk perubahan politik – dan *economism* – yang memandang evolusi sosial sebagai hasil perkembangan tenaga produktif, yang diyakini untuk menjadikan transformasi hubungan produksi sebagai hal yang akan pasti terjadi.

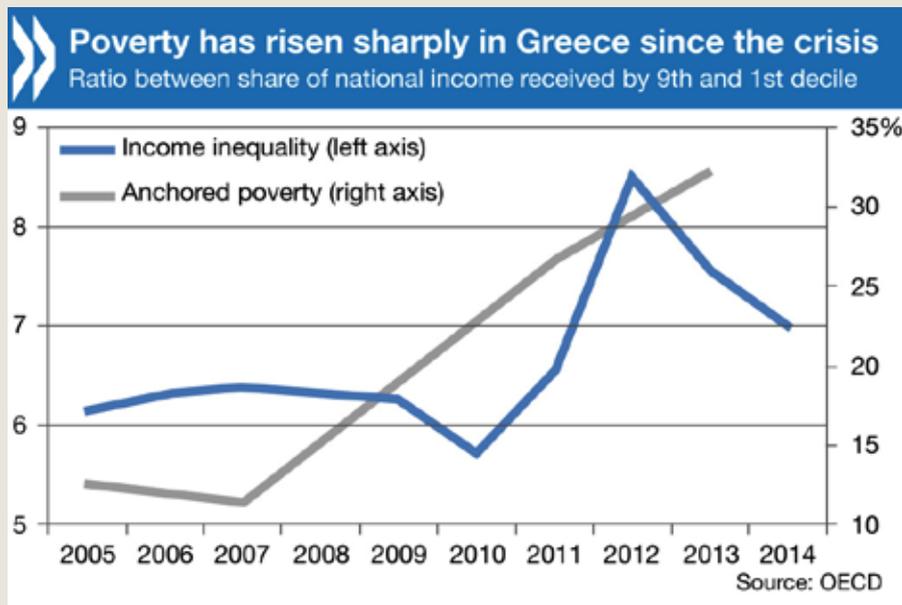
Dalam menandatangani suatu Memorandum baru, SYRIZA setuju untuk menghapuskan kerangka institusional dan tenaga kerja pasar dari “kekakuan” – yang sebenarnya mencerminkan kemenangan para pekerja sebelumnya. SYRIZA tetap dominan dalam kancah politik Yunani, tetapi pada waktu ini partai ini lebih dipahami sebagai suatu partai sosial demokrat arus utama, daripada sebagai gerakan radikal sayap kiri. ■

Korespondensi langsung kepada John Milios <john.milios@gmail.com>

> Pemenang dan Pecundang

dalam Krisis Finansial Yunani

oleh **Spyros Sakellariopoulos**, Universitas Panteion, Yunani



Grafik yang memperlihatkan peningkatan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi semenjak dimulainya krisis Yunani

Di awal tahun 2010, George Papandreou, Perdana Menteri saat itu, berkesimpulan bahwa situasi keuangan negara sudah sedemikian parah sehingga negaranya tidak dapat berharap untuk berutang di pasar dunia, dan karena itu tidak dapat lagi membayar angsuran utang negara.

Berlawanan dengan pandangan yang berlaku, masalah-masalah Yunani tidak bersumber dari tingginya upah para pekerja Yunani, juga bukan karena negara itu boros. Upah di Yunani hanya sekitar 83% dari tingkat upah rata-rata di EU15 (negara-negara anggota Uni Eropa sebelum perluasan pada tahun 2014), sementara sebagai persentase PDB, belanja negara per kapita sama de-

ngan rata-rata belanja EU15. Krisis ekonomi Yunani sebenarnya berakar pada strategi kelas penguasa nasional dan cara strategi tersebut berintegrasi ke dalam pembagian kerja internasional, terutama saat Yunani bergabung dalam Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) pada tahun 1981 dan Kesatuan Moneter Eropa tahun 2002. Ketidakmampuan kapitalisme Yunani untuk bersaing memakai aturan yang ditetapkan dalam sistem mata uang tunggal mengakibatkan runtuhnya PDB yang berakibatnya rasio utang terhadap PDB terus bertambah.

Bgaimanapun juga, pada awal tahun 2010, dengan harapan bisa membayar utang kepada bank-bank Prancis dan Jerman yang menguasai sebagian besar surat-surat berharga Yunani – dan untuk menghindari ke-

bangkrutan yang akan mengalihkan masalah Yunani ke jantung ekonomi Eropa – maka diputuskanlah bahwa Yunani akan menerima pinjaman dari Uni Eropa, Bank Sentral Eropa dan IMF.

Akan tetapi sebelum bisa meminjam uang, Yunani pertama-tama harus mengadopsi kebijakan penghematan. Antara 2010 dan 2016, tiga nota kesepakatan kerjasama ekonomi diterapkan, satu program jangka menengah dan delapan paket kebijakan khusus – termasuk antara lain pemotongan gaji pegawai negeri, pemotongan dana pensiun bagi para usia lanjut, pemotongan upah minimum (dari 751 Euro menjadi 586 Euro bagi kebanyakan pekerja, dan 490 Euro bagi pekerja di bawah usia 25 tahun), kenaikan pajak penambahan nilai dari 19% menjadi 24%,

peningkatan penerimaan pajak dari sektor real estate, kelenturan pasar tenaga kerja, pemutusan hubungan kerja besar-besaran di sektor publik, kenaikan pajak yang bersifat regresif dan masih banyak lagi.

Seberapa efektifkah kebijakan-kebijakan itu? Pertama, utang negara – masalah yang menjadi asal muasal kebijakan-kebijakan itu – telah meningkat, baik secara absolut maupun relatif. Dari €300 milyar di akhir 2009, utang Yunani bertambah menjadi €314,4 milyar menjelang akhir 2015. Karena ekonomi Yunani menyusut dalam periode itu, utang nasional sebagai persentase PDB meroket dari 126,7% menjadi 179%. Sementara itu, pengangguran bertambah dari 9% pada tahun 2009 menjadi 23,5% pada bulan Mei 2016, sedangkan PDB menyusut dari €237,4 milyar tahun 2009 menjadi €179 milyar tahun 2015.

Angka-angka statistik itu membeberkan kegagalan semua kebijakan tersebut. Akan tetapi bila dilihat lebih teliti, kelihatan bahwa kebijakan tersebut sebenarnya menghasilkan pemenang dan pecundang. Yang berada di pihak yang kalah adalah kelas pekerja (buruh dan produsen pertanian skala kecil dan menengah). Perlu disebutkan juga bahwa hanya 15% di antara para penganggur saat ini menerima tunjangan pengangguran; sebelum krisis 40% penganggur Yunani bisa mendapatkan tunjangan ini. Prosentase orang yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar mereka bertambah dari 11% menjadi 20%; saat ini, lebih dari satu juta orang Yunani tinggal dalam rumah tangga di mana tidak ada seorangpun yang bekerja, atau di rumah tangga yang ada pekerja tetapi hanya bekerja kurang dari tiga bulan dalam setahun. 50% pensiunan menerima pensiun kurang dari €500 tiap bulan. Dari tahun 2009 hingga 2015 angka kemiskinan nasional melonjak dari 27,6% menjadi 35,7%.

Bahkan mereka yang tetap bekerja kehilangan penghasilannya. Komponen upah dalam PDB turun dari 64% menjadi 54%, dan, secara keseluruhan, pekerja telah kehilangan sepertiga daya belinya. Daya beli rata-rata anjlok, yang semula 84% dari

rata-rata EU15 menjadi 65%. Antara 2008 dan 2015, 427.000 orang Yunani bermigrasi keluar negeri, kebanyakan lulusan universitas. Dari 849.289 pelaku bisnis yang aktif di Yunani tahun 2008, hanya 692.286 yang masih aktif di tahun 2014. Kesejangan melebar: rasio pendapatan antara orang terkaya yang 20% dan orang termiskin yang 20% naik dari 5,6/1 menjadi 6,6/1.

Penurunan kualitas hidup juga kelihatan dalam data demografi Yunani. Pengeluaran untuk kesehatan turun sebanyak 25%. Antara 2011 dan 2014, berdasarkan data statistik yang tersedia, terjadi lebih sedikit kelahiran daripada kematian. Angka kematian bayi meningkat sebanyak 51%.

Tapi siapakah pemenang dalam krisis ini? Pemenang terbesar mencakup bank-bank asing, yang sejak awal krisis menguasai utang Yunani dalam jumlah besar. Pada bulan Juni 2010, total utang negara dan swasta kepada bank asing berjumlah \$252,1 milyar; 75,1% dari utang itu berasal dari bank asal Prancis (\$83,1 milyar), Jerman (\$65,4 milyar) dan Amerika Serikat (\$36,2 milyar). Per Desember 2010, jumlah utang kepada bank asing telah berkurang sebanyak 42%, menjadi \$145,7 milyar (\$56,7 milyar kepada bank-bank Prancis, \$34 milyar kepada bank-bank Jerman, \$7,3 milyar kepada bank-bank Amerika). Menurut nota kesepakatan yang pertama, bank-bank tersebut berhasil mendapatkan kesempatan untuk menjual sebagian besar utang Yunani itu – suatu pola yang akan makin jelas dalam bulan Desember 2011, ketika bank-bank asing itu telah memangkas proporsi utang kepada Yunani menjadi hanya \$35 milyar. Menjelang pemilu 2012, bank-bank asing sudah hampir bebas dari seluruh beban utang Yunani.

Ada juga pemenang di dalam negeri Yunani: pada tahun 2010, perusahaan-perusahaan paling sukses di Yunani menanggung laba sekitar €2,2 milyar; per 2014, laba naik menjadi €10,2 milyar. 300 perusahaan (minus sektor keuangan) dengan angka penjualan tertinggi antara 2009 dan 2014 mengalami kenaikan omset dari 53,6% total penjualan nasional menjadi 59,8%, dan aset mereka

naik dari 42,2% menjadi 44%.

Terakhir, pada tahun 2011, 445 orang di Yunani menguasai harta sebanyak lebih dari €30 milyar, atau totalnya sebanyak €50 milyar, sekitar 24% dari PDB. Per 2014, kelompok paling makmur itu sedikit bertambah: 565 orang menguasai harta senilai €70 milyar atau 39,5% dari PDB untuk tahun itu. Tahun 2014, kelompok elit itu termasuk sebelas milyader Yunani dengan total harta sebanyak €18 milyar, naik dari sembilan orang tahun 2013 lalu dengan aset €16 milyar.

Perkembangan tersebut tercermin pada pola stratifikasi sosial di negara ini. Menurut sebuah survei baru-baru ini, kelas borjuis Yunani menguasai 2,8% PDB (turun dari 3,2% tahun 2009); strata kaya pedesaan 0,6% (turun dari 0,7%); borjuis kecil tradisional 7,0% (turun dari 7,3%); borjuis kecil baru 21,9% (turun dari 29,5%); strata menengah pedesaan 1,2% (turun dari 1,9%); strata miskin pedesaan 7,3% (turun dari 7,4%); dan kelas pekerja 59,2% (naik dari 49,1%).

Apapun alasan bagi kebijakan-kebijakan itu, hasilnya memperlihatkan suatu cap sosial yang jelas. Bank-bank asing besar, di bawah bimbingan lembaga-lembaga keuangan internasional dan pemerintah negara asalnya, melindungi kepentingannya sendiri. Meskipun ada kerugian terkait likuidasi ekonomis di beberapa sektor, para elit ekonomi negara ini berhasil menambah hartanya dan meningkatkan laba melalui eksploitasi intensif terhadap kelas pekerja lokal dan menyusutnya usaha kecil dan menengah. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Spyros Sakellariopoulos <sakellariopoulos@gmail.com>

> *Bailout* Yunani sebagai Kejahatan Negara Bersama Korporasi

oleh **Stratos Georgoulas**, Universitas Aegean, Yunani

Siapakah yang diuntungkan oleh bailout?



Komunitas akademik internasional baru-baru ini berupaya mendefinisikan “kejahatan korporasi bersama negara”—yaitu tindakan ilegal atau mencederai masyarakat yang tercipta melalui interaksi antara lembaga tata kelola politik dengan lembaga produksi dan distribusi ekonomi.

Dari sudut pandang politik dan penelitian, istilahnya sesuai dengan apa yang sering disebut “korupsi,” tetapi ada dua perbedaan penting. Pertama, upaya untuk mengkriminalisasikan tindakan-tindakan ini bertujuan untuk melindungi hak asasi manusia dan mencegah kerugian bagi masyarakat; tindakan-tindakan ini melibatkan jauh lebih banyak korban jiwa, kerugian fisik atau lainnya, dan hilangnya harta atau uang, daripada tindakan kriminal yang lebih banyak dikenal seperti pembunuhan, percobaan pembunuhan, pencurian, dan sebagainya. Kedua, akar kejahatan ini terkait erat dengan tindakan politik dan sosial yang biasa: kesalingtergantungan antara negara dan modal—baik melalui konversi langsung

uang publik ke kontrak swasta atau menyediakan fasilitas dan mempromosikan kebijakan tertentu—terletak di jantung masyarakat kapitalis kita.

Selain itu, kejahatan korporasi bersama negara ini sering melibatkan suatu dimensi tambahan. Dengan demikian, “kejahatan globalisasi” menambahkan suatu dimensi yang menarik, ketika lembaga supranasional, seperti *International Monetary Fund* dan Bank Dunia, menyebabkan kerugian sosial yang nyata bagi seluruh populasi. Kebijakan dan program-program ekonomi yang menetes ke bawah (*top-down*) yang konsisten dengan kepentingan negara-negara yang kuat dan perusahaan multinasional, memiliki efek drastis pada kehidupan manusia, terutama di “negara-negara berkembang,” ketika program-program seperti “Pembayaran Utang” menyebabkan ketidakstabilan politik, kemudian ke sistem-sistem pemerintahan yang paternalistik atau *clientelist* [pertukaran barang-jasa dengan dukungan politik], yang

kemudian menelurkan kejahatan terorganisasi, korupsi, otoriterisme dan penindasan oleh negara, penggunaan penyiksaan, dan bahkan kemungkinan genosida.

Di Yunani, di mana kami telah hidup di bawah pelaksanaan Kebijakan Memorandum yang ditetapkan melalui perjanjian antara pemerintah dengan organisasi-organisasi supranasional, seperti para pemberi pinjaman internasional, kami telah menyaksikan pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan sosial yang luas. Langkah-langkah yang diterapkan di bawah “program-program *bailout*” [bantuan finansial untuk mengatasi kesulitan finansial atau kebangkrutan] telah secara langsung mempengaruhi kondisi kehidupan, melanggar hak asasi manusia yang wajib dihormati, dilindungi dan dipromosikan Yunani berdasarkan hukum nasional, regional dan internasional. Penyesuaian drastis yang dikenakan pada perekonomian dan masyarakat Yunani telah membawa suatu kemerosotan cepat terhadap taraf hidup dan tidak sesuai dengan keadilan sosial, kohesi sosial, demokrasi, atau hak asasi manusia. Hak asasi manusia apakah yang telah dilanggar? Mari kita lihat beberapa contoh.

Hak atas Pekerjaan. Reformasi pasar tenaga kerja yang dikenakan oleh Memorandum telah secara parah merusak hak untuk bekerja di Yunani, sehingga menyebabkan gangguan kelembagaan yang parah. Penghancuran perjanjian tawar-menawar kolektif (*collective bargaining*) dan arbitrase buruh membangkitkan kembali perjanjian kerja individu sebagai penentu utama kondisi kerja. Pemotongan upah dan kenaikan pajak secara berturut-turut mengakibatkan pemutusan hubungan kerja secara besar-besaran, mengikis standar perburuhan, meningkatkan ketiadaan jaminan kerja, dan menciptakan kerentanan luas, yang mendorong pekerja perempuan dan muda ke pekerjaan terlalu luwes yang bergaji rendah. Upah minimum diturunkan menjadi setingkat di bawah garis kemiskinan Yunani.

Hak atas Kesehatan. Program Penyesuaian Ekonomi 2010 membatasi pengeluaran kesehatan masyarakat menjadi 6% dari PDB; program 2012 mengharuskan pengurangan biaya operasional rumah sakit sebesar 8%. Rumah sakit dan apotek mengalami kelangkaan luas di kala berusaha mengurangi pengeluaran farmasi dari €4,37 miliar di tahun 2010 ke €2 miliar pada tahun 2014.

Hak atas Pendidikan. Langkah-langkah khusus dalam Memorandum memotong perekrutan guru, memaksakan transfer guru melalui skema mobilitas tenaga kerja, mengurangi gaji guru, menggabungkan dan menutup sekolah, meningkatkan jumlah siswa per kelas dan memperpanjang jam mengajar per minggu. Jabatan mengajar dibiarkan tidak terisi, 1.053 sekolah ditutup dan 1.933 digabungkan

antara 2008 dan 2012. Pemotongan anggaran mengakibatkan banyak sekolah dibiarkan tanpa penghangatan ruangan.

Hak atas Jaminan Sosial. Pemotongan pengeluaran yang dikenakan Memorandum mengurangi jaminan sosial, termasuk pensiun, tunjangan pengangguran dan tunjangan keluarga. Sejak 2010 pensiun telah dipotong rata-rata sebesar 40%, jatuh ke bawah garis kemiskinan bagi 45% dari pensiunan.

Hak atas Perumahan. Yunani menghapuskan perumahan sosial di tahun 2012, sebagai suatu “tindakan pendahuluan” sebelum menawarkan subsidi penyewaan bagi 120.000 rumah tangga, dan bantuan perumahan bagi kaum usia lanjut. Undang-undang dan peraturan baru memungkinkan prosedur penggusuran cepat tanpa sidang peradilan. Pada tahun 2014 lebih dari 500.000 orang di Yunani adalah tunawisma atau tinggal di perumahan yang tidak aman atau tidak memadai.

Hak untuk Menentukan Nasib Sendiri. Privatisasi milik negara secara besar-besaran, terutama melalui prosedur “jalur cepat,” melanggar hak-hak konstitusional dan ketentuan-ketentuan yang menjamin prinsip kedaulatan rakyat, hak milik, dan perlindungan lingkungan.

Hak atas Keadilan. Langkah-langkah yang dikenakan kreditor mengharuskan Yunani untuk mereformasi sistem peradilan, termasuk peningkatan biaya secara substansial. Secara finansial jalan ke pengadilan telah menjadi sulit bagi warga—terutama ketika mereka mengalami pemotongan drastis pada gaji dan pensiun.

Hak atas Kebebasan Menyatakan Pendapat. Sejak tahun 2010 tindakan legislatif dan administratif telah membatasi kebebasan menyatakan pendapat dan berkumpul—hak untuk menyatakan pendapat secara bebas sedang ditantang secara sistematis dan efektif, dan kebebasan berserikat dilanggar. Pihak berwenang telah mencegah protes yang sah terhadap kebijakan-kebijakan yang berbasis Memorandum, melarang pertemuan-pertemuan umum, menindas demonstrasi damai, melakukan pencegahan melalui penangkapan, menginterogasi anak-anak di bawah umur, dan menyiksa demonstrasi anti fasis—seringkali dengan bekerjasama dengan para preman (*vigilante*) proto-fasis dari partai Golden Dawn.

Pada waktu ini 23,1% penduduk Yunani hidup di bawah garis kemiskinan; angka kemiskinan relatif telah naik hampir dua kali lipat antara 2009 dan 2012, dan hampir dua-pertiga jatuh miskin akibat kebijakan penghematan. Deprivasi materi parah meningkat dari 11% dari populasi

tahun 2009 menjadi 21.5% pada tahun 2014; pada tahun 2013 lebih dari 34% anak-anak terancam kemiskinan atau pengucilan sosial. Berbagai langkah telah memperburuk ketidaksetaraan secara dramatis, dalam mana 10% dari penduduk termiskin telah kehilangan 56,5% dari pendapatan mereka secara mengkhawatirkan.

Di kala masyarakat Yunani sedang mengalami pelanggaran hak asasi manusia dan kerusakan sosial yang luas, pada saat yang sama badan-badan legislatif menciptakan suatu "kebijakan hak istimewa," yang semakin memungkinkan korupsi. Inisiatif legislatif ini beraspek majemuk dan mengarah ke kekebalan rezim terhadap hukum pidana, baik dalam bentuk pengecualian terhadap penuntutan bagi individu dan kelompok tertentu—terutama dalam kontrak atau konsesi publik, seperti misalnya Siemens, program persenjataan, dan privatisasi—atau dalam bentuk intervensi legislatif yang represif terhadap pengadilan pidana yang melibatkan pembatasan, penangguhan, atau penghentian penuntutan yang tertunda. Ironisnya, bahkan di kala para kreditor mendesak Yunani untuk menindak penghindaran pajak, mereka berusaha menghapuskan pajak sebesar 26% pada transaksi lintas negara.

Kejahatan-kejahatan oleh korporasi bersama negara melampaui tindak pidana atau penyimpangan individu manakala kejadian tersebut tidak merupakan pengecualian namun sudah menjadi norma, ciri utama suatu era dalam mana ketidakpastian (*anomie*) berlaku—artinya, dalam mana representasi kolektif (*collective representations*) dan kesadaran kolektif (*collective consciousness*) [konsep-konsep Durkheim] telah dilemahkan. Kolusi antara negara dan korporasi seperti itu kini menggambarkan "semangat zaman" era modern kita.

Kita sedang menghadapi suatu tantangan yang mendesak: apa yang dapat dilakukan untuk memerangi kejahatan-kejahatan oleh negara bersama korporasi yang telah lepas kendali pada saat—sangat mirip dengan masa fasis di awal abad duapuluh—pengendalian sosial formal, lembaga-lembaga modern, dan wacana ilmiah terdistorsi oleh struktur-struktur pemerintahan, produksi, dan masyarakat sipil yang berlaku?

Sangat penting bagi kita untuk terus bermimpi mengenai suatu dunia yang lebih baik. Selain itu, meskipun simbiosis antara negara dengan bisnis ini telah berlangsung lama, namun hal ini tidak pernah sepenuhnya diterima. Ini adalah suatu proses dinamis, dan sebagai ilmuwan dan warga negara kita harus terus mengungkapkannya dan mempertanyakannya. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Stratos Georgoulas
<s.georgoulas@soc.aegean.gr>

> Aktivisme Aborsi Argentina di Era Misoprostol

Oleh **Julia McReynolds-Pérez**, Universitas Wisconsin-La Crosse, AS



Pada sebuah patung Sang Perawan, gerakan Perempuan di atas Ombak (*Women on Waves*) menyebarkan pesan mereka – “Keputusanmu, Aborsi Aman” – dan menawarkan nomor telepon khusus untuk memperoleh nasehat langsung.

Sebuah gempa sedang mengguncang perdebatan tentang aborsi di Amerika Latin, dan episentrumnya terletak pada sebuah obat pil kecil berwarna putih. Ketersediaan Misoprostol [obat gangguan lambung yang dapat digunakan untuk aborsi] di wilayah tersebut telah mengubah praktek aborsi secara tersembunyi dengan dampak yang jauh. Strategi-strategi baru dari aktivis swabantu (*self-help activists*) – beberapa di antaranya melibatkan kerjasama kaum feminis dan ahli kesehatan profesional – telah mengubah perdebatan politik seputar aborsi, karena para aktivis berupaya untuk membuat aborsi menjadi lebih mudah terjangkau dan terlihat, meskipun legalitasnya tetap ditentang.

Aborsi telah lama bersifat ilegal di seluruh Amerika Latin, suatu wilayah di dunia dengan terbanyak penganut agama Katolik, tetapi praktek tersebut telah lama menyebar luas. Di seluruh Amerika Latin, para perempuan kaya secara diam-diam telah mengakses [praktek] aborsi klandestin yang aman dan mahal di tempat-tempat praktek dokter swasta yang sudah terlatih, sementara kaum perempuan miskin telah mempertaruhkan nyawa mereka dalam prosedur di lorong-lorong gang.

Sistem aborsi klandestin ganda ini membuat prosedur dan perdebatan politik tentang ilegalitasnya sebagian besar tidak terawasi oleh publik, tetapi medan praktik dan politik aborsi telah bergeser sejak permulaan 1990an. Sejak saat itu, Misoprostol, suatu *prostaglandin* sintetis yang telah disahkan oleh Badan Obat dan Makanan AS (Food and Drug Administration, disingkat FDA) untuk mengatasi gangguan lambung, telah dijual di apotik-apotik di Amerika Latin untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tetapi misoprostol juga dapat digunakan untuk membuat kontraksi kandungan, sehingga menjadikannya alat yang manjur untuk aborsi secara klandestin. Di negara-negara di mana aborsi adalah legal, misoprostol biasa digunakan sebagai kombinasi dengan obat lain, yakni *mifepristone*, untuk aborsi secara medis dalam periode tiga bulan pertama. Penting untuk diketahui, bahkan bila dikonsumsi sendiri atau tanpa pengawasan kedokteranpun, misoprostol jauh lebih aman daripada metode-metode aborsi gelap, yang terlalu kerap menggunakan gantungan baju dari kawat atau jarum rajut.

Antara tahun 2012 dan 2015 saya melakukan pe-

>>



Misoprostol – obat yang diedarkan secara luas untuk aborsi

nelitian etnografis di Argentina, berupaya untuk memahami bagaimana teknologi farmasi baru ini mengubah politik dan praktik aborsi. Di Argentina – bahkan di seluruh Amerika Latin – ketersediaan misoprostol yang relatif mudah telah menciptakan kesempatan-kesempatan bagi strategi-strategi inovatif aktivis. Banyak kelompok aktivis aborsi tergerak oleh kampanye-kampanye trans-nasional untuk melakukan aksi. Pada tahun 2001, Dr Rebecca Gomperts meluncurkan [kampanye] “Women on Waves,” dengan membawa sebuah kapal yang dilengkapi peralatan medis ke perairan internasional di lepas pantai negara-negara yang melarang aborsi, untuk mengundang para perempuan datang ke kapal guna mendapatkan akses aborsi yang aman. Setelah kampanye ini, ia membuat [kampanye via internet] “Women on Web” secara terus-menerus, di mana masyarakat di seluruh dunia dapat memesan resimen [resep atau penanganan farmakologis] untuk aborsi medis secara penuh. Organisasi tersebut mengirim secara langsung paket-paket tanpa tanda kepada para perempuan yang tinggal di negara-negara di mana aborsi merupakan tindakan ilegal. Organisasi milik Gomperts mendukung pula penggunaan akses *hotline* untuk aborsi di seluruh dunia agar para perempuan yang membutuhkan dapat meminta petunjuk rinci mengenai bagaimana melakukan induksi aborsi dengan memakai misoprostol.

Sementara upaya transnasional dari Dr Gomperts menarik perhatian media internasional, strategi-strategi aktivis lokal yang telah melonjak sebagai tanggapan terhadap peluang-peluang baru ini kurang mendapat perhatian. Di seluruh Amerika Latin, para aktivis feminis muda menjadi pelopor dalam memudahkan akses aborsi yang aman bagi kaum perempuan miskin dengan menggunakan misoprostol: beberapa kelompok menyajikan informasi, kelompok lain menyediakan pelayanan farmasi untuk aborsi, dan beberapa kalangan profesional medis mulai memainkan peran aktivis dari dalam sistem kesehatan publik.

Lesbianas y Feministas por la Descriminalización del Aborto (Kelompok Lesbian dan Feminis untuk Dekriminalisasi Aborsi, atau *Lesbians and Feminists for the Decriminalization of Abortion*, disingkat LFDA) telah

terbentuk dalam tujuh tahun yang lalu sebagai salah satu kelompok aktivis aborsi yang paling menonjol di Argentina. LFDA mengawali dengan membuat *hotline* aborsi yang aman dengan dukungan dari “Women on Web,” dan sekarang menyediakan informasi tentang aborsi yang aman kepada para perempuan di seluruh Argentina. Sebagai tambahan, mulai tahun 2013, LFDA membuka klinik-klinik konsultasi aborsi secara tatap muka di seluruh penjuru kota Buenos Aires, di mana para aktivis memberikan informasi lengkap tentang bagaimana melakukan induksi aborsi secara aman dalam bahasa non-teknis yang sederhana. Para klien diharapkan dapat memperoleh sendiri misoprostol, baik di apotik-apotik lokal maupun dari pasar gelap.

LFDA, sebagaimana halnya kelompok-kelompok aktivis lain yang menyediakan pelayanan serupa, menggambarkan pekerjaan mereka sebagai upaya yang dilindungi oleh norma-norma tentang “kebebasan informasi,” dan sebagai suatu kewajiban kesehatan masyarakat untuk “pengurangan dampak buruk” (*harm reduction*). Klaim yang pertama didasarkan pada fakta bahwa mereka hanya menyediakan informasi yang dapat diperoleh dengan mudah melalui banyak cara-cara lain; karena mereka tidak menyediakan obat pil, para aktivis ini tidak menyediakan pelayanan kesehatan, hanya informasi. Klaim “pengurangan dampak buruk” meminjam bahasa dari program-program kesehatan masyarakat seperti program penukaran jarum suntik, untuk mengklaim suatu kewajiban masyarakat luas dalam menyampaikan bahaya-bahaya kegiatan gelap bagi kesehatan masyarakat.

Para aktivis lain bahkan telah melangkah lebih jauh lagi. Sejak sekitar 2014, sebuah asosiasi yang bersifat longgar terdiri dari kelompok-kelompok aktivis lokal meluncurkan suatu gerakan nasional yang dikenal dengan nama “*Socorristas en Red*” (Penanggap Pertama *Online*). Jaringan *online* ini menyediakan tidak hanya informasi, tetapi juga apa yang mereka sebut *acompañamiento* (penyertaan), yaitu dengan menyediakan misoprostol atau pelayanan obat-obat farmasi lengkap untuk aborsi (yang diperoleh melalui kontak-kontak para aktivis transnasional), maupun dukungan terus-menerus melalui hubungan telepon genggam untuk seluruh proses aborsi yang dilakukan di

rumah. Karena kelompok-kelompok ini menyediakan obat-obat aborsi dan tidak hanya informasi, kebanyakan biasanya tidak menonjolkan diri. Di ibukota yang liberal seperti Buenos Aires, kelompok-kelompok tersebut beroperasi secara relatif terbuka, tetapi di provinsi-provinsi yang lebih konservatif para aktivis harus menggantungkan diri pada kehati-hatian para klien mereka agar terhindar dari tuntutan hukum (*prosecution*).

Pada akhirnya, beberapa orang profesional kesehatan telah mulai mengubah sistem kesehatan masyarakat Argentina dalam, seringkali dengan menawarkan apa yang mereka sebut “konsultasi pra dan pasca-aborsi.” Sebagaimana para aktivis LFDA, pelayanan-pelayanan ini menyediakan informasi rinci untuk melakukan induksi aborsi dengan menggunakan misoprostol, menghindari isu legalitas dengan menyerahkan kepada kaum perempuan untuk memperoleh sendiri misoprostol, dan melakukan aborsi di rumah mereka. Pada segelintir klinik, para profesional aktivis ini didukung oleh departemen kesehatan kota atau sengaja dibiarkan [dengan maksud positif] (*benign neglect*) oleh atasan langsung mereka. Beberapa klinik sebenarnya memproses semua aborsi sebagai “pemutusan kelahiran berdasarkan indikasi legal,” dengan mengemukakan bahwa melanjutkan kehamilan yang tak diharapkan mengandung risiko kesehatan yang hakiki – sehingga semua aborsi harus dianggap legal berdasarkan ketentuan hukum pidana yang membolehkan aborsi untuk melindungi kesehatan perempuan. Mereka menyediakan pelayanan aborsi secara langsung kepada para pasien mereka. Tetapi di luar kasus-kasus yang lebih eksplisit itu, banyak profesional kesehatan mengatakan kepada saya saat wawancara bahwa mereka menyediakan konsultasi misoprostol secara diam-diam, dan kadang memberikan resep obat mendesak para perempuan agar menjaga rahasia.

Tidak ada cara untuk mendapatkan perkiraan yang akurat tentang berapa banyak dokter yang mungkin terlibat dalam jenis aktivisme ini, meskipun pastinya mereka merupakan minoritas dalam suatu profesi berjenjang yang masih dikendalikan secara luas oleh jaringan kelompok eksklusif Katolik yang konservatif secara sosial. Tetapi dampak lebih luas dari praktik aktivis ini adalah jelas – khususnya karena kelompok-kelompok aktivis mengumpulkan data demografis dan kesehatan dari klien-klien mereka, yang kemudian diterbitkan sebagai cara untuk membuat isu kesehatan masyarakat tentang aborsi ilegal tersebut dapat terlihat. Laporan-laporan yang dapat diakses secara *online*, makalah-makalah yang disajikan pada konferensi-konferensi nasional tentang para profesional medis, dan laporan-laporan bayangan yang diajukan mengenai konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (*Convention on the Elimination of all Forms of Discrimination Against Women*, disingkat CEDAW) telah membuat praktik aborsi jauh lebih terlihat dibanding keadaan sebelumnya yang saya sebut sebagai “epidemiologi yang feminis.”

Hal yang penting, aktivisme Argentina seputar akses kepada aborsi medis mencerminkan suatu kegagalan di

pihak negara untuk menegakkan hukum aborsi negara secara agresif, yang masih tetap berlaku walaupun praktik-praktik sudah berubah. Memang, hanya ada sedikit kemauan politik yang jelas untuk menuntut secara aktif suatu praktik yang tersebar luas – khususnya karena upaya-upaya penegakan hukum dapat meraih simpati bagi para perempuan muda yang rentan, yang akan dilihat sebagai korban dari tekanan penegakan hukum secara berlebihan oleh kepolisian. Menurut data yang dikumpulkan para aktivis, puluhan ribu perempuan telah dibantu untuk menggugurkan kehamilannya tanpa mempertaruhkan nyawanya. Sementara, gerakan feminis Argentina yang lebih besar terus menuntut legalisasi aborsi atas dasar permintaan.

Namun pergeseran politik Argentina baru-baru ini telah menciptakan ketidakpastian baru bagi kalangan aktivis feminis. Pada akhir tahun 2015 suatu partai politik sayap kanan mulai berkuasa, menggantikan pemerintahan kiri-tengah dari Presiden Cristina Fernández de Kirchner, yang tampaknya dengan senang hati memalingkan muka sementara para aktivis memperluas akses kepada prosedur yang aman.

Baru-baru ini, kelompok-kelompok hak asasi manusia internasional telah mengancam keputusan Argentina untuk menghukum seorang perempuan muda karena dianggap melakukan pembunuhan di Tucumán, sebuah provinsi di Utara yang konservatif, setelah ia berusaha meminta bantuan pada sebuah rumah sakit akibat keguguran yang ia alami. Karena misoprostol digunakan secara luas, dan karena penggunaannya tidak dapat dibuktikan setelah dipakai, para dokter konservatif cenderung mencurigai bahwa setiap pasien yang mengalami keguguran dianggap telah menggunakan obat tersebut. Dalam kasus ini Belén (nama samara yang digunakan dalam laporan media) dijatuhi hukuman penjara delapan tahun, sebuah hukuman yang sangat berat – khususnya karena tidak ada bukti yang dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa keguguran itu berkat induksi. Di awal tahun 2016, ia telah meringkuk dua tahun di penjara untuk menunggu disidang. Ketika hukuman yang lama itu dijatuhkan, gerakan feminis dan aborsi memobilisasi demonstrasi di seluruh Argentina, menyerukan pembebasan Belén. Di bawah tekanan yang memuncak, pada bulan Agustus 2016, Mahkamah Agung provinsi Tucumán memerintahkan untuk membebaskan Belén sambil menunggu banding.

Akankah pergeseran dalam politik Argentina yang lebih luas mengakibatkan serangan balasan terhadap aktivisme aborsi, berupa penindasan terhadap para aktivis aborsi – dan lebih banyak Beléns lain? Sementara kebangkitan sayap kanan ini tentu mengkhawatirkan, jelas bahwa para aktivis ini tidak bermaksud untuk mundur atau diintimidasi: karena selama dua dekade terakhir, upaya mereka telah secara permanen mengubah dinamika politik Amerika Latin di seputar aborsi, dan para aktivis berharap bahwa upaya mereka yang telah berkembang luas itu tidak dapat dibatalkan. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Julia McReynolds-Pérez <julia.mcreynolds@gmail.com>

> Berbaliknya Hak-hak Aborsi Meksiko

oleh **Susana Lerner**, El Colegio de México, Mexico, **Lucía Melgar**, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Meksiko dan **Agnès Guillaume**, Institut de recherche pour le développement, Perancis



Gerakan Meksiko untuk melegalkan aborsi.

Pada tahun 2007, Distrik Federal Meksiko (*Distrito Federal*, yang baru-baru ini berganti nama menjadi Mexico City) melegalisasi aborsi sampai dengan kehamilan pada dua belas minggu pertama – sebuah kemenangan untuk masyarakat sipil yang telah berjuang sejak tahun 1990-an untuk memberi hak kepada perempuan untuk menentukan pilihan. Namun di sebagian besar Meksiko pembatasan aborsi telah diperketat.

Sejak tahun 2008, reformasi hukum dan konstitusi baru yang berusaha untuk “melindungi kehidupan sejak saat pembuahan” telah diberlakukan di delapan belas negara bagian di

Meksiko, yang terkini terjadi di Veracruz pada bulan Juli 2016. Apa yang menjadi pendorong reformasi ini dan apa implikasi-implikasinya?

Perdebatan dan para pelaku utama yang terlibat dalam diskusi aborsi di Meksiko perlu dipahami dalam kerangka politik kependudukan yang lebih luas. Sejak tahun 1970-an pemerintah Meksiko telah mempromosikan program keluarga berencana dan inisiatif program lainnya untuk mengurangi angka kelahiran, menawarkan berbagai pilihan kepada perempuan untuk mengontrol besaran keluarga, dan untuk meningkatkan kesehatan, kehidupan, dan kesejahteraan keluarga. Meskipun sukses dalam mengurangi tingkat pertumbuhan penduduk,

karena tidak terdapatnya kebijakan sosial dan ekonomi yang lebih luas yang mendukung upaya ini, maka kondisi material penduduk tidak menjadi lebih baik.

Pada tahun 1990-an kebijakan nasional telah berubah ke “fokus pada kesehatan reproduksi,” setelah pemerintah Meksiko mengafirmasi kembali Program Aksi Konferensi Internasional tentang Kependudukan dan Pembangunan tahun 1994. Perjanjian ini, yang ditandatangani di Kairo, memprioritaskan hak-hak seksual dan reproduksi, dengan argumen bahwa praktik aborsi yang dilakukan dalam kondisi yang tidak layak merupakan masalah kesehatan masyarakat yang penting, mengajak negara-

negara yang menandatangani untuk memperbolehkan perempuan memperoleh akses ke aborsi yang aman – termasuk di dalamnya menghapuskan halangan-halangan hukum dan melonggarkan undang-undang anti-aborsi.

Dalam dua puluh tahun terakhir, para feminis dan akademisi telah mendorong Distrik Federal Meksiko untuk melegalisasi aborsi, yang mencapai puncaknya pada reformasi Mexico City yang moderat dan gradualis. Pada tahun 2007, badan legislatif lokal dari Distrik Federal memutuskan untuk memperbolehkan aborsi hingga dua belas pekan kehamilan (meskipun, terkecuali dalam situasi khusus tertentu, aborsi tetap ilegal selama tiga bulan terakhir kehamilan). Yang juga penting, dengan mendefinisikan kehamilan sebagai “bagian dari proses reproduksi manusia yang dimulai dengan tertanamnya embrio dalam endometrium,” reformasi Distrik Federal menghindari diskusi mengenai kapan dan bagaimana kehidupan manusia dimulai. Di bawah Undang-Undang tahun 2007, dokter dapat menolak untuk melakukan aborsi sebagai *conscientious objectors* [seseorang yang menolak melaksanakan tugas karena pertimbangan hati nurani], namun, berdasarkan hukum, institusi kesehatan harus memiliki dokter yang bukan *objector* di antara pegawainya. Partai-partai liberal termasuk partai penguasa PRI memberikan dukungan suara, sementara partai sayap kanan PAN memilih untuk menolak.

Dengan mewajibkan pelayanan kesehatan masyarakat yang berada di bawah kewenangan pemerintah kota yang eksklusif untuk menawarkan pelayanan aborsi yang bebas biaya dan aman, hukum menjamin akses bagi semua perempuan untuk mengakhiri kehamilannya secara legal. Lebih penting lagi, hukum juga memberikan kebebasan bagi

perempuan hamil untuk memutuskan apa yang akan ia lakukan: perempuan dapat meneruskan kehamilannya, menyerahkan anaknya untuk diadopsi atau mengakhiri kehamilannya, setelah persetujuan tindakan medis (*informed consent*) ditandatangani. Lebih jauh lagi, mereka mendapatkan jaminan akses pada metode-metode kontrasepsi untuk mencegah kehamilan yang tidak direncanakan (dan, dengan demikian, dapat menghindari aborsi di kemudian hari).

Dengan demikian, reformasi Mexico City membingkai aborsi yang tidak aman sebagai masalah kesehatan masyarakat, keadilan sosial dan diskriminasi. Di atas segalanya, hal ini dilakukan untuk melindungi hak asasi manusia, mengakui hak perempuan untuk membuat keputusannya sendiri berkaitan dengan tubuh dan otonomi reproduksi dan seksualnya. Selama sembilan tahun terakhir, reformasi ini telah memberikan akses aborsi yang aman untuk lebih dari 160.000 perempuan termasuk perempuan dari negara bagian Meksiko lainnya yang dapat pergi ke Mexico City untuk melakukan prosedur ini.

Kekuatan-kekuatan konservatif – yang dipimpin oleh hirarki Katolik dan yang didukung oleh kelompok Evangelis dan denominasi Kristen lainnya – dengan cepat bereaksi. Sebagaimana juga terjadi di bagian dunia lainnya, kaum konservatif menegaskan bahwa “pembelaan pada kehidupan” menghendaki bahwa kebebasan dan kehidupan perempuan disubordinasikan pada hak embrio yang telah mereka anggap sebagai “seorang manusia” – seraya menolak untuk mengakui adanya realitas aborsi yang tidak aman, atau konsekuensi aborsi tersebut pada kesehatan dan kehidupan keluarga perempuan. Di lain pihak, kelompok feminis membela keutamaan hak perempuan dan hak universal untuk kesehatan, termasuk di dalamnya bahwa peran keibuan

harus dipilih dengan bebas dan sukarela, serta menekankan bahwa pemisahan secara prinsip antara gereja dan negara harus tetap utama bagi demokrasi Meksiko.

Saat Mexico City mulai memperbolehkan akses yang lebih besar pada aborsi tiga bulan pertama, organisasi seperti *Provida (Pro-Life)*, *Profamilia (Pro-Family)*, dan Ikatan Profesi Praktisi Hukum Katolik Meksiko (*the Catholic Bar Association of Mexico*) menekankan bahwa “hidup dimulai pada saat pembuahan dan saat itu pula manusia dengan hak-haknya ada.” Para aktivis anti aborsi mencoba berbagai strategi termasuk protes di jalan secara terus menerus, seruan untuk aksi yang dilakukan oleh para uskup dari berbagai kota, aksi langsung untuk mencegah perempuan yang akan melakukan aborsi, serta pendekatan (*lobby*) dan litigasi. Hal serupa mereka lakukan untuk dengan penuh semangat menentang hubungan homoseksual yang telah dilegalisasi, serta berjuang menentang keluarga berencana dan menentang pendidikan seks di sekolah negeri. Secara lebih halus, mereka juga sukses menghapus istilah “hak seksual dan reproduksi” serta rujukan ke suatu perspektif gender dalam banyak dokumen publik nasional dan internasional.

Pada tahun 2008, kelompok konservatif menghadap Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan keberatan atas reformasi. Meskipun Mahkamah menemukan bahwa legalisasi aborsi adalah konstitusional, namun penetapannya didasarkan pada tiga temuan tambahan. Pertama, Mahkamah memutuskan hak seorang perempuan atas tubuhnya – suatu hak yang mengimplikasikan bahwa negara wajib melindungi hak perempuan sehingga mereka dapat mengambil keputusan tentang kesehatan fisik dan mentalnya mereka sendiri, dan tentang hidup mereka. Kedua,

Mahkamah juga memutuskan bahwa hak hidup bukan hak absolut atau suatu “hak super” di atas hak-hak lain yang ditetapkan dalam konstitusi dan perjanjian internasional; maka jika terjadi konflik antara hak-hak yang ada, badan legislatif harus menimbang alternatif yang ada. Akhirnya, berdasarkan temuan kedua, Mahkamah menetapkan kewenangan badan legislatif lokal untuk membuat perubahan pada hukum pidana lokal.

Setelah keputusan Mahkamah Konstitusi, kelompok konservatif berpaling ke badan legislatif negara-negara bagian, untuk berusaha mengubah konstitusi atau hukum pidana negara bagian, dengan klaim untuk “melindungi kehidupan sejak saat pembuahan” atau “fertilisasi,” dan menghukum perempuan yang menjalani aborsi.

Pada pertengahan 2016, dengan dukungan gereja Katolik dan para legislator dari seluruh partai politik termasuk beberapa partai kiri, kekuatan anti aborsi telah mencapai tujuannya di 18 negara bagian Meksiko. Akibat undang-undang baru ini, perempuan-perempuan Meksiko saat ini banyak yang menjalani hukuman penjara,

terkadang dengan tuduhan “pembunuhan yang diperberat karena adanya relasi kekerabatan” (yaitu karena pembunuhan anak (*infanticide*) dengan hukuman 20 sampai 30 tahun penjara. Perempuan lain diharuskan menjalani intervensi psikiatri, seakan-akan perempuan yang menjalankan otonominya, memiliki penyakit mental. Hukuman-hukuman baru ini terjadi seiring dengan kegagalan yang terus menerus di banyak negara bagian di Meksiko untuk mengikuti norma hukum nasional yang mengizinkan aborsi yang legal dan aman dalam beberapa situasi khusus seperti dalam kasus perkosaan (satu-satunya indikasi yang secara hukum sah di seluruh negara), dalam kasus kelainan janin, atau ketika ada ancaman terhadap kesehatan dan kehidupan perempuan.

Sampai dengan pertengahan 2016 perdebatan masih melibatkan dua posisi berlawanan tersebut. Kelompok-kelompok konservatif berargumen untuk “membela kehidupan,” mensubordinasi kehidupan dan kebebasan perempuan, membela hak hidup embrio yang dianggap seorang manusia yang legal. Kelompok-kelompok ini gagal mempertimbangkan konsekuensi aborsi yang tidak

aman seperti kematian ibu, penyakit atau dampaknya pada keluarga. Di lain pihak, kelompok-kelompok liberal mengadvokasi keutamaan hak-hak perempuan, peran keibuan yang dipilih dengan bebas, hak universal atas kesehatan, dan menuntut penghormatan bagi negara sekuler, yang merupakan suatu konsep kunci dalam konstitusi Meksiko.

Perjuangan panjang untuk hak perempuan di Meksiko terus berlanjut. Para feminis dan aktivis organisasi non-pemerintah terlalu sering melakukan hal-hal reaktif dibandingkan proaktif ketika kekuatan konservatif memiliki agenda mengkriminalisasi aborsi. Dinamika ini perlu diubah. Dalam pandangan kami, masyarakat sipil harus mempertegas kembali suaranya dan menuntut liberalisasi dan legalisasi aborsi di tingkat nasional. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada:
 Susana Lerner <slerner@colmex.mx>
 Lucía Melgar <lucia.melgar@gmail.com>
 Agnès Guillaume <Agnès.Guillaume@ird.fr>

> Aborsi sebagai Kekerasan

Perjuangan Peru

oleh **Erika Busse**, Universitas Pacific, Peru dan anggota Komite Penelitian ISA mengenai Migrasi (RC31), Perempuan dan Masyarakat (RC32), Gerakan Sosial, Tindakan Kolektif dan Perubahan Sosial (RC48) dan Penelitian Keluarga (RC06)



"Pawai Raya untuk Kehidupan" menentang Aborsi di Lima, Peru pada tanggal 23 Maret 2013. Foto: Paolo Aguilar/EPA.

Pada pertengahan Agustus 2016, ribuan orang Peru turun ke jalan-jalan di Lima, dimobilisasi oleh slogan "Ni Una Menos" ["Not One Less"] (tidak kurang seorangpun). Di antara para demonstran terdapat presiden Peru yang baru saja terpilih, korban kekerasan fisik dan seksual, anggota organisasi perempuan dan feminis, afiliasi partai politik, serta para menteri dan perwakilan kongres. Mengutuk kekerasan terhadap perempuan, pawai ini digambarkan sebagai salah satu

mobilisasi sosial yang paling penting di Peru sejak 40 tahun terakhir, di mana perempuan dan laki-laki, anak perempuan dan anak laki-laki, orang tua dan anak-anak, kakek-nenek dan cucu mereka berbaris berdampingan.

Pemicu demonstrasi tersebut adalah adanya video yang menunjukkan seorang perempuan yang diseret rambutnya oleh mantan pacarnya di area ruang tunggu sebuah hotel. Namun kasus ini dihentikan; hakim menyimpulkan bahwa dari cedera perempuan

>>

an tersebut tidak ada indikasi adanya niat pemerkosaan atau pembunuhan.

Di bawah slogan “Ketika seseorang terkena, kita semua terkena” (*When one is hit, all of us are hit*), kelompok “*Ni Una Menos*” menyerukan pada warga Peru untuk memprotes kekerasan dan diskriminasi terhadap perempuan. Bahkan para penyelenggara terkejut oleh tanggapan yang sangat besar – yang sejajar dengan mobilisasi sejenis yang baru-baru ini terjadi di kota-kota Amerika Latin, semua menuntut diakhirinya kekerasan terbuka terhadap perempuan dan sistem keadilan yang rusak. Bagi banyak orang Amerika Latin, demonstrasi ini menunjukkan sebuah momen harapan: keadaan sedang berubah dan isu-isu perempuan, khususnya kekerasan terhadap perempuan, berada di garis depan kesadaran publik.

Fokus pada kekerasan terhadap perempuan – dan pada impunitas yang diberikan kepada para agresor – menandai suatu pergeseran dalam cara para feminis Amerika Latin membingkai (*frame*) tuntutan sekitar hak-hak reproduksi. Dengan membingkai kembali (*reframe*) perdebatan mengenai aborsi dalam lingkup “kekerasan seksual terhadap perempuan (dan anak-anak),” dan dengan menyoroti “pemaksaan peran keibuan” (atau pemaksaan aborsi ilegal), para feminis telah membingkai kembali fokus perdebatan pada isu kekerasan negara di atas kekerasan seksual itu sendiri – berlawanan dengan pemingkaiannya sebelumnya, yang menitikberatkan pada hak-hak reproduksi sebagai masalah pilihan individu.

Bingkai kekerasan terhadap perempuan merupakan perlawanan terhadap pandangan bahwa aborsi adalah hasil dari hasrat gairah “egois” perempuan setelah berperilaku bebas, dengan menempatkan fokus pada kekerasan terhadap perempuan sebagai isu moral. Perlawanan terhadap kampanye dapat diartikan bahwa kekerasan terhadap perempuan dianggap tidak ada, atau tidak penting. Pemingkaiannya yang berpotensi kuat ini memiliki sisi buruk yaitu memandang perempuan sebagai korban, yang berpotensi memperkuat stereotip lama gender dan hirarki. Meskipun demikian,

peralihan dari pemingkaiannya akses ke aborsi dalam hubungan dengan hak-hak perempuan, ke hubungan dengan penghapusan kekerasan seksual tampaknya telah memperluas dukungan populer bagi upaya dekriminialisasi (*decriminalization*) aborsi dalam kasus pemerkosaan.

Alih-alih melakukan upaya dekriminialisasi aborsi dengan hanya berfokus pada negara, para aktivis juga menghimbau masyarakat sipil, profesional seperti dokter dan anggota kelompok agama, untuk berusaha mengubah cara pandang warga Peru mengenai hak-hak perempuan dan kekerasan terhadap perempuan. Pergeseran besar dari suatu pemingkaiannya hak reproduksi ke fokus pada kekerasan seksual telah memberikan dasar bagi gerakan yang lebih luas, mengikutsertakan kelompok-kelompok lain termasuk aktivis LGBT, organisasi perempuan akar rumput, kelompok-kelompok Katolik, pemuda, dan para selebriti. Dekriminalisasi aborsi dalam kasus pemerkosaan tampaknya telah mendapatkan dukungan yang lebih luas dari masyarakat Peru daripada hanya sekedar di kalangan “sebagian” feminis. Kampanye ini menggabungkan pendekatan *bottom-up* (terutama, mengumpulkan tanda tangan dari warga Peru biasa) dan pendekatan *top-down* (kampanye iklan TV yang melibatkan selebriti, artis, dan politisi, serta warga biasa). Bersama-sama perkumpulan seperti Karpas Merah (*Alfombra Roja, Red Carpet*), kampanye ini merekrut pendukung dalam demonstrasi dan pameran. Dalam suatu konteks di mana adanya kepercayaan yang rendah terhadap lembaga-lembaga negara, penekanan kampanye pada keterlibatan warga menggarisbawahi komitmen para aktivis untuk membuat demokrasi berjalan.

Sejauh ini, pemingkaiannya kembali yang baru ini gagal untuk menghasilkan tanggapan yang kuat dari para legislator. Di Peru, misalnya, suatu upaya untuk mengubah konstitusi Peru untuk mengizinkan aborsi dalam kasus pemerkosaan gagal untuk mendapatkan dukungan; hal yang sama, rancangan Undang-undang Kongres yang akan melakukan dekriminialisasi terhadap aborsi dalam kasus perkosaan di-peti-eskan. Rupanya, sementara seba-

gian besar legislator bersimpati pada korban kekerasan fisik yang menghasilkan memar dan patah tulang, ketika kekerasan fisik (pemukosaan) berakibat kehamilan, pertanyaan mengenai hak siapa yang harus dimenangkan menjadi suatu isu moral.

Meskipun begitu, baru-baru ini ada beberapa gerakan kecil dalam wacana dan kebijakan publik. Pada tahun 1924 hukum pidana Peru melakukan dekriminialisasi terhadap aborsi terpetik dalam kasus di mana hidup seorang perempuan hamil berada dalam bahaya, tapi tidak membuat protokol yang memungkinkan tenaga medis untuk melakukan aborsi dalam kasus-kasus ini – yang berarti bahwa setiap dokter yang membuat keputusan untuk mengakhiri kehamilan yang berisiko bisa berakhir di penjara. Untuk 90 tahun berikutnya, sebagian besar dokter – sebagaimana dapat dimengerti — enggan untuk melakukan aborsi dalam keadaan apapun.

Namun pada tahun 2014, meskipun kritik meluas, terutama dari para penganut agama Katolik dan Evangelis, Peru akhirnya mengadopsi sebuah protokol di mana dokter bisa mendapatkan persetujuan untuk mengakhiri kehamilan berisiko. Hambatan bagi implementasi penuh tetap ada: beberapa dokter tidak tahu bagaimana melakukan aborsi, kaum perempuan kurang informasi, dan rasa takut dan malu menghambat penggunaan protokol tersebut bahkan ketika hidup perempuan hamil berada dalam bahaya.

Adopsi protokol baru ini menunjukkan bahwa pemingkaiannya hak aborsi sebagai suatu masalah kesehatan perempuan mungkin lebih berhasil daripada menyajikannya sebagai masalah hak-hak reproduksi. Sebagaimana ditunjukkan dalam pawai besar “*Ni Una Menos*,” isu perempuan mungkin telah maju ke depan dalam perdebatan politik Peru; tetapi apakah ini akan membawa perubahan yang berarti, terutama dalam penanganan pembunuhan terhadap perempuan (*femicide*), masih harus dilihat. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Erika Busse <e.busse@up.edu.pe>

> Pengantar: Ilmu-Ilmu Sosial di Dunia Arab

oleh **Mohammed A. Bamyeh**, Universitas Pittsburgh, AS, Editor *International Sociology Reviews*, dan anggota Komite Penelitian ISA mengenai Teori dan Penelitian Alienasi (RC36) dan Biografi dan Masyarakat (RC38)

Ilmu pengetahuan baru untuk era baru” meringkas ambisi laporan *Social Sciences in the Arab World: Forms of Presence* (<http://www.theacss.org/uploads/English-ASSR-2016.pdf>).¹ Laporan yang disponsori oleh Majelis Arab untuk Ilmu-ilmu Sosial (*Arab Council for the Social Sciences* (ACSS)), telah dikerjakan selama dua tahun, dengan masukan dari suatu tim peneliti. Hampir seluruh data yang digunakan dalam Laporan ini adalah asli, yang dikumpulkan untuk pertama kali oleh tim proyek ini.

Meskipun Laporan ini mencakup data kualitatif dan kuantitatif terkait besaran dan kondisi ilmu-ilmu sosial di universitas-universitas Arab, pusat-pusat penelitian, asosiasi-asosiasi profesional, dan jurnal-jurnal ilmiah, laporan ini memberikan perhatian pula pada ilmu sosial publik. Hal ini mencakup studi tentang bagaimana organisasi masyarakat sipil menggunakan ilmu sosial dalam karya mereka, termasuk di dalamnya data tentang ilmu sosial di dalam ruang publik Arab – di surat kabar, program-program televisi, jurnal budaya, dan majalah populer Arab.

Kami mendokumentasikan suatu peningkatan eksponensial di dalam berbagai institusi yang menjadi rumah untuk ilmu-ilmu sosial Arab di 22 negara di kawasan Arab, khususnya dalam dua atau tiga dekade terakhir. Tujuh puluh persen dari universitas-universitas di kawasan Arab saat ini baru ada di awal tahun 1990-an, jumlah jurnal ilmiah telah meningkat empat kali lipat sejak awal 1980-an, sementara, dalam periode yang sama, jumlah pusat-pusat penelitian telah meningkat setidaknya enam kali. Suatu revolusi ilmu pengetahuan telah secara diam-diam terbentuk di seluruh kawasan Arab dalam dua atau tiga dekade terakhir, meskipun pengetahuan kita tentang isi sebenarnya revolusi tersebut masih sedikit.

Menariknya, perkembangan lembaga-lembaga pengetahuan ini seolah terpisah dari kekayaan nasional; kami menyaksikan di negara kaya maupun miskin. Nampaknya

yang lebih penting daripada kekayaan adalah faktor-faktor seperti kebebasan untuk meneliti; suatu masyarakat sipil yang relatif kuat yang mempromosikan atau menimba keuntungan dari penelitian ilmu sosial; keberadaan kelas terdidik yang relatif besar di sebuah negara; tingkat perhatian dunia internasional atas perkembangan lokal di sebuah negara; dan terkait dengan itu, kekuatan koneksi komunitas pengetahuan lokal pada ilmu-ilmu sosial global. Pertumbuhan masyarakat sipil di periode yang sama nampaknya terkait dengan pertumbuhan ilmu sosial, dan keduanya mungkin menjadi bagian besar dari suatu himpunan faktor yang dikaitkan dengan Pemberontakan Arab (*Arab uprisings*), yang dimulai pada akhir 2010 dan terus berkembang.

Dalam universitas-universitas Arab, Laporan ini mendokumentasikan ketidakseimbangan yang besar. Ilmu ekonomi berada di bagian paling depan ilmu-ilmu sosial di universitas-universitas Arab, mencakup lebih dari seperempat bagian dari total fakultas ilmu sosial yang ada. Antropologi, yang hanya berjumlah 2% dari total fakultas, hampir tidak tampak, dan ilmu-ilmu sosial lainnya berada di antara kedua kutub ini.

Namun kebanyakan universitas-universitas Arab sangat menitikberatkan pada pengajaran, yang berarti bahwa mereka memberikan sedikit waktu dan insentif untuk para ilmuwan sosial yang berharap dapat melakukan penelitian maupun aktivitas publik. Oleh karena itu peran-peran di ranah publik tersebut cenderung dijalankan oleh pusat-pusat penelitian, yang, karena mereka lebih lebih dipersatukan oleh tema daripada oleh disiplin ilmu, cenderung memprakarsai kerja lintas disiplin ilmu maupun kerjasama sosial. Pusat-pusat penelitian, yang sebagian besar baru didirikan belum lama bersejang, juga menunjukkan perkembangan substantif dalam produktivitas ilmu, pada saat ini mempublikasikan hampir seluruh jurnal ilmiah Dunia Arab. Libanon, Palestina dan Yordania menjadi rumah pusat-pusat pene-

“Transformasi sosial yang komprehensif merupakan kepedulian utama para ilmuwan sosial Arab”

litian yang jumlahnya besar jika dibandingkan dengan jumlah penduduk mereka, dan bahkan Djibouti berada di depan negara yang tergolong lebih kaya seperti Qatar dan Bahrain.

Menariknya, negara-negara kaya seperti Kuwait dan Arab Saudi menunjukkan tidak lebih dari tingkat menengah dalam bidang produktivitas penelitian. Temuan ini kontradiktif dengan indeks pemeringkatan internasional yang, menurut perspektif kami, kurang berhasil melaporkan secara akurat keadaan ilmu pengetahuan Arab – untuk sebagian disebabkan karena mereka mengistimewakan publikasi dalam bahasa-bahasa Eropa maupun dalam jalur-jalur khusus. Praktek-praktek pemeringkatan ini sepertinya lebih didorong oleh suatu pendewaan hirarki (*fetishizing of hierarchy*), daripada suatu perhatian nyata pada isi pengetahuan, relevasinya maupun kegunaannya dalam masyarakat tempat pengetahuan tersebut dihasilkan.

Hampir setengah Laporan ini didedikasikan untuk ilmu-ilmu sosial di ruang publik. Analisis tentang organisasi masyarakat sipil, surat kabar, majalah populer, program televisi, dan majalah budaya menunjukkan bahwa ilmu-ilmu sosial sering kali ditampilkan dalam format singkat, dalam jumlah yang bervariasi dan dalam beragam bentuk. Laporan ini menemukan bahwa hampir semua organisasi masyarakat sipil menggunakan dan bahkan menghasilkan ilmu sosial, meskipun dengan cara-cara yang sesuai dengan misi mereka – suatu kesimpulan yang menyatakan bahwa ada keterkaitan antara pertumbuhan ilmu sosial masa kini di Arab dan semakin nampaknya kehadiran (*visibility*) masyarakat sipil Arab. Dalam berbagai saluran (*outlet*) di ruang publik, majalah budaya (*cultural periodicals*) sepertinya terbuka untuk penelitian ilmu sosial; sekitar 20% halaman didedikasikan untuk artikel-artikel ilmu sosial, meskipun dengan cara-cara yang mencerminkan perhatian para komunitas pemerhati budaya daripada para akademisi ilmu-ilmu sosial. Surat kabar, majalah populer, dan program televisi memberikan lebih sedikit ruang atau waktu untuk ilmu-ilmu sosial. Tetapi aspek kuantitas kurang penting dibandingkan dengan kualitas, seperti yang dapat kita lihat dari bentuk-bentuk teladan mengenai ilmu sosial untuk publik yang dapat ditemukan di dalam surat kabar Al-Quds Palestina, atau di majalah populer Kuwait Al-Arabi.

Transformasi sosial secara komprehensif, baik secara revolusioner ataupun reformis, merupakan perhatian utama para ilmuwan sosial Arab, khususnya selama lima tahun terakhir (Januari 2010-Desember 2014). Dalam perio-

de tersebut, analisa isi yang kami lakukan menunjukkan bahwa “Reformasi Arab” (*Arab Spring*) merupakan tema utama yang menjadi perhatian para ilmuwan sosial Arab, selain tema seperti “demokrasi,” “hak” (*rights*), “despotisme,” “partisipasi,” “masyarakat sipil,” dan sejenisnya. Laporan juga menemukan bahwa isu perempuan merupakan tema yang terlihat sangat jelas di semua bidang, yang sering dikaitkan dengan diksusi tentang hak, warga negara, dan partisipasi, daripada dikaitkan dengan isu-isu yang lebih “tradisional” seperti keluarga atau anak-anak. Alur transformasi sosial lain yang lebih khusus terkait, seperti “pemuda,” “pendidikan,” atau bahkan “pembangunan” kurang mendapatkan perhatian dari para peneliti. Menariknya, beberapa tema yang diduga muncul malah tidak ada – terutama tentang “Dunia Muslim.” Di kala konsep ini di Barat diperlakukan sebagai kategori analisis yang penuh arti, para ilmuwan sosial Arab nyaris mengabaikannya samasekali, mungkin karena mereka tidak melihat “Dunia Muslim” ini sebagai sebuah kategori analisis yang kohe-sif – meskipun mereka memang menganalisis “Islam” dan politik keagamaan dalam perspektif ilmu sosial.

Laporan ini menyimpulkan bahwa ilmu-ilmu sosial Arab semakin memantapkan diri sebagai bagian penting dari ranah pengetahuan kontemporer Arab, meskipun secara umum terasa bahwa para pembuat kebijakan mengabaikan penelitian mereka. Laporan tentang ilmu-ilmu sosial Arab sekarang direncanakan untuk terbit setiap dua tahun sekali, dengan tujuan memantau kontribusi mereka untuk ilmu-ilmu sosial global maupun untuk masa depan kawasan ini. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Mohammed Bamyeh <mab205@pitt.edu>

¹ Catatan Editor: Mohammed Bamyeh adalah penulis laporan yang sedang didiskusikan di sini

> Infrastruktur Ilmu Sosial Baru di Kawasan Arab

oleh **Seteney Shami**, Majelis Arab untuk Ilmu-ilmu Sosial, Lebanon



Konferensi kedua yang diselenggarakan Majelis Arab untuk Ilmu-ilmu Sosial, Maret 2015.

Kawasan Arab menghadapi meningkatnya tantangan sosio-ekonomi, lingkungan, politik, dan keamanan. Pada saat yang bersamaan, mereka kekurangan kapasitas akademis dan penelitian yang kuat yang mungkin dapat memberikan pencerahan mengenai tantangan ini, menganalisa perubahan sosial, memupuk perdebatan publik, atau menginformasikan kebijakan publik. Sebagaimana telah dicatat dalam beberapa Laporan Perkembangan Manusia PBB (*UN Human Development Reports*),

keperluan nyata negara Arab akan ilmu pengetahuan memerlukan kapasitas yang lebih kuat, kualitas, ruang lingkup, jangkauan, dan pengaruh dari penelitian – terlebih penelitian sosial – dalam kawasan tersebut.

Peningkatan kesadaran ini telah memicu berbagai inisiatif selama dekade lalu, yang bertujuan menanggapi beberapa diantara tantangan-tantangan tersebut. Insititusi-institusi pendidikan tinggi dan penelitian sedang dibentuk, bersamaan dengan lebih banyak kesempatan beasiswa bagi siswa dari

>>

kawasan tersebut untuk mengikuti pendidikan pascasarjana. Sejumlah penghargaan untuk pencapaian akademis telah dibuat, sementara jumlah asosiasi profesional bertambah secara perlahan. Namun, program dan kesempatan yang terfokus pada ilmu-ilmu sosial tetap sangat terbatas, dan kesempatan lintas negara-negara kawasan Arab belum tersedia secara memadai.

Dalam konteks ini, Majelis Arab untuk Ilmu-ilmu Sosial (*Arab Council for the Social Sciences*) didirikan dan dikembangkan oleh para ilmuwan sosial Arab yang peduli, yang pertama kali bertemu pada tahun 2006 untuk mendiskusikan cara-cara mengatasi masalah yang dihadapi ilmu-ilmu sosial dan penelitian sosial dalam kawasan tersebut. Selagi proses perencanaan berakhir, kawasan digoncang oleh pemberontakan Arab mulai tahun 2010. Kejadian ini antara lain membantu membuka ruang publik dan perdebatan, membangkitkan suatu perasaan harapan dan kesempatan baru untuk perubahan. Dalam hal ini, arti penting untuk mempertanyakan *status quo* dan urgensi pengembangan visi baru untuk masyarakat – maupun metode baru untuk mewakili masa lalu, masa kini, dan masa depan – menjadi nyata. Kesadaran mengenai pentingnya ilmu-ilmu sosial dibangun di jalanan.

Akibat yang berkembang telah mencakup diperbaharainya otoritarianisme, tumbuhnya rasa tidak aman dan kekerasan, maupun perang di beberapa negara di kawasan tersebut. Namun, bibit yang telah ditabur terus bertunas, andaiapun akar yang berkembang melilit dan memutar untuk melindungi diri mereka sendiri dari pengawasan dan penindasan. Pemandangan institusional sedang mengembang dan inisiatif yang menarik menyediakan kemungkinan baru yang menarik bagi kemitraan institusional dalam tautan penelitian – aktivisme, tautan penelitian- ranah publik, dan juga untuk mengembangkan kesempatan pendidikan baru dalam ilmu-ilmu sosial (misalnya mata

kuliah online, kelompok baca, atau “*teach-ins*” di organisasi non-pemerintah). Memperbanyak dan melindungi ruang bagi kebebasan melakukan penelitian dan diskusi penting bagi masa depan kawasan tersebut.

> ACSS

Majelis Arab untuk Ilmu-ilmu Sosial (ACSS) adalah suatu organisasi keanggotaan nirlaba bermarkas di Beirut, Lebanon, yang bekerja untuk mempromosikan ilmu-ilmu sosial (dipahami secara luas) lintas kawasan dan secara global. Sambil menjalani operasi menjelang akhir tahun keempat, ACSS kini memiliki tujuh orang pekerja penuh waktu dan dua pekerja paruh waktu. ACSS telah mendirikan Fokus Utama (*Focal Point*) di Palestina dengan seorang konsultan senior paruh waktu serta seorang staf administratif dan finansial paruh waktu. *Focal Point* kedua di Aljazair, dengan susunan yang sama, sedang direncanakan. ACSS telah meluncurkan empat program pendanaan yang menawarkan beasiswa penelitian, konferensi sekali dalam 2 tahun, forum penelitian sekali dalam 2 tahun (untuk penerima beasiswa), seri kuliah tahunan dan situs web aktif serta layanan informasi (*outreach*) melalui media sosial. ACSS telah mendanai lebih dari 130 orang penerima beasiswa, memiliki lebih dari 270 orang anggota, dan menyediakan beasiswa untuk perjalanan (*mobility*) maupun pelatihan dan peluang menjalin jejaring bagi para anggota, penerima beasiswa, dan ilmuwan sosial pada umumnya.

Meski telah terjadi perubahan-perubahan radikal di kawasan Arab, namun misi, visi, dan nilai-nilai asli ACSS sebagaimana dirumuskan dan diratifikasi dalam konferensi pertamanya pada tahun 2008 tetap berlaku dan penting (lihat <http://www.theacss.org/pages/mission>). Prinsip ACSS adalah mempromosikan *kualitas, inklusivitas, fleksibilitas, dan kemandirian* penelitian dan pemikiran sosial dalam kawasan tersebut. Maka ACSS menempatkan fokus pada evaluasi keperluan, dan

penyediaan kesempatan bagi komunitas ilmu sosial kawasan, dengan fokus khusus pada ilmuwan muda di jenjang doktor atau paska doktoral.

Salah satu di antara proyek-proyek temama ACSS adalah proyek *Arab Social Science Monitor* (ASSM) yang menganalisa keadaan ilmu-ilmu sosial dalam kawasan itu. Laporan pertamanya, “*Social Sciences in the Arab Region: Forms of Presence*” oleh Dr. Mohammed Bamyeh menganalisa kondisi institusional dan substantif lintas kawasan (<http://www.theacss.org/uploads/English-ASSR-2016.pdf>), menggambarkan perkembangan kawasan secara substansial dalam departemen-departemen ilmu sosial dan pusat-pusat penelitian. Namun, laporan tersebut juga menyoroti kurangnya program master dan doktor, jurnal, asosiasi profesional dan infrastruktur lain yang diperlukan untuk produksi ilmu yang kuat dan kritis. Di sisi positif, laporan tersebut juga mendeskripsikan kehadiran ilmu-ilmu sosial dan keilmuan secara cukup substantif dalam ranah publik, termasuk karya sastra, surat kabar, jurnal populer, televisi, dan media lainnya.

> Ilmu-ilmu Sosial Arab: Marginal atau Bangkit?

Pengabaian resmi terhadap ilmu-ilmu sosial di kawasan Arab mencerminkan gagasan mengenai pengembangan dan modernitas yang telah lama mengatur perencanaan pendidikan dan kedermawanan, bersamaan dengan pergeseran dalam beberapa dekade terakhir dari fokus tradisional ke sains, kedokteran, dan teknik ke arah keuangan, manajemen, dan diversifikasi sektor swasta. Keadaan dan status ilmu-ilmu sosial bersama-sama melambangkan kekurangan sistem pendidikan di kawasan tersebut, khususnya menyoroti kekurangan dalam institusi pendidikan tinggi, di mana peningkatan pendaftaran mahasiswa telah berlangsung dengan mengorbankan nilai kualitas. Perkembangan perguruan ting-

gi swasta telah memicu perbedaan mencolok antara institusi pendidikan maupun marginalisasi ilmu-ilmu sosial lebih lanjut. Pada waktu yang bersamaan, suara akademis dalam perdebatan politik publik telah berkurang, karena para pembuat kebijakan menuduh ilmuwan sosial mengejar pertanyaan-pertanyaan penelitian yang tidak relevan bagi kebijakan, dan ilmuwan sosial mengeluh bahwa para pembuat kebijakan mengabaikan hasil penelitian.

Fakta bahwa kebijakan pendidikan, konsep mengenai pengembangan, dan pembatasan dalam ruang publik umumnya tidak dipermasalahakan menunjukkan pada kelemahan-kelemahan pada komunitas ilmu-ilmu sosial di kawasan ini, dan adanya kegagalan dalam melibatkan diri dalam tiga fungsi hakiki suatu ranah intelektual yang otonom: kemampuan mengartikulasikan alternatif-alternatif yang didasarkan pada pembuktian terhadap agenda-agenda yang bersifat hegemonis dan ideologis, kemampuan mempengaruhi diskusi publik dan pembuatan kebijakan, dan kemauan melindungi dan mempromosikan kepentingan profesional. Sama pentingnya, karena adanya berbagai kelemahan institusional, ialah bahwa para ilmuwan sosial Arab belum dapat berpartisipasi penuh dalam jaringan ilmu di tingkat kawasan atau internasional. Komunitas ilmu-ilmu sosial Arab umumnya tetap tersisihkan dari jaringan forum internasional utama dan jaringan pe-

nelitian yang bersemangat, dan tidak berkontribusi secara efektif terhadap produksi pengetahuan global.

Kesemuanya ini merupakan isu-isu yang ingin ditangani ACSS, meskipun dalam kenyataan ACSS telah beroperasi dalam suatu lingkungan yang semakin sulit sejak ACSS didirikan. Bersamaan dengan meningkatnya konflik di Irak, Libya, Syria, dan Yaman, lingkungan penelitian menjadi semakin tegang di tempat-tempat seperti Mesir, dengan meningkatnya pengawasan dan intimidasi terhadap ilmuwan dan aktivis. Hal ini telah mempengaruhi jangkauan kawasan ACSS, membatasi kemampuannya untuk menyelenggarakan kegiatan dan acara di berbagai negara. Selain itu, penerima beasiswa ACSS di negara-negara tertentu telah dipaksa untuk mengubah rencananya dan kadang-kadang mengurangi komponen kerja lapangan dalam proyek mereka. Terakhir, bepergian menjadi semakin sulit, dengan diterapkannya persyaratan visa baru dan larangan bepergian.

Namun meskipun dijumpai semua kesulitan tersebut – atau justru oleh karenanya – hal yang terpenting bagi ACSS sekarang ialah untuk terus menawarkan dukungan dan kesempatan kepada para peneliti di kawasan ini, dan untuk membangun dan mempererat jaringan. Kami dengan senang hati mencatat ketahanan para penerima beasiswa, dan tekad mereka untuk melanjutkan proyek-proyek pene-

litian. Jumlah pelamar program dan peserta kegiatan tidak berkurang, dan perhatian pada ACSS terus meningkat. Lebanon tetap menjadi suatu tempat yang di pada umumnya memfasilitasi interaksi di dalam kawasan ini dan memberikan kebebasan akademis. ACSS waspada dalam beradaptasi pada lingkungan yang berubah dan inovatif dalam penyusunan acara dan aktivitasnya, sementara tetap berkomitmen pada tujuan dan nilai dasarnya. Kami mengharapkan peningkatan kolaborasi kawasan dan global serta dijalinnya jaringan, dan menjadi sarana untuk promosi bagi revitalisasi ilmu sosial Arab. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Seteney Shami <shami@theacss.org>

> Ilmu-ilmu Sosial Arab Sebelum dan Sesudah Arab Spring

oleh **Idriss Jebari**, Universitas Amerika di Beirut, Lebanon



Apakah Arab Spring berdampak pada ilmu-ilmu sosial?

Dalam laporan pertamanya mengenai keadaan ilmu-ilmu sosial di dunia Arab, Profesor Sosiologi Muhammad Bamyeh menjawab teka-teki ilmu-ilmu sosial Arab masa kini: suatu bidang ilmu yang secara historis tampak lemah, yang keberadaannya berdampingan dengan realitas sosial kaya yang riuh dan kompleks. Lima tahun setelah *Arab Spring* (Reformasi Arab), sudah terdapat cukup jarak kritis untuk bertanya bagaimana bidang ilmu tersebut telah menjelaskan transformasi ini. Bagaimanakah laporan tersebut menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh ilmu-ilmu sosial Arab? Pelajaran mengenai keterlibatan publik apakah yang harus ditarik oleh para ilmuwan sosial muda Arab?

>>

> Tantangan bagi Ilmu-ilmu Sosial Arab

Rendahnya kinerja produksi pengetahuan Arab telah didokumentasikan dengan baik oleh para ilmuwan, praktisi, dan mahasiswa. Dalam laporan ini, Bamyeh menghindari generalisasi yang lazim dibuat seperti kurangnya integrasi global atau ketidakstabilan politik, tetapi sebaliknya menempatkan fokus pada struktur kelembagaan yang telah membentuk bidang tersebut. Ia berpendapat bahwa, alih-alih memilih isolasi, para ilmuwan sosial Arab menderita “rendahnya kapasitas berjejaring” dan “erosi koneksi dengan warisan formatif mereka.” Secara umum, tujuan dari ilmuwan sosial Arab tidak selalu mencari visibilitas di panggung global, tetapi untuk menjelaskan objek penelitian mereka dan mempengaruhi kebijakan; pertanyaan-pertanyaan yang sekarang paling mendesak berputar di sekitar keterasingan disiplin dari kekuatan-kekuatan masyarakat dan pasar, yang mempertanyakan nilai dan manfaatnya.

Fokus kelembagaan ini menempatkan objek ilmu-ilmu sosial di kawasan Arab dalam kerangka ketegangan antara universalisme dan kekhasan (*specificity*). Bamyeh tampaknya condong ke arah universalisme, sementara mengakui bahwa disiplin-disiplin ilmu ini telah tumbuh melalui interaksi dengan ilmu-ilmu sosial Barat, mengikuti suatu tradisi spesifik yang ia telusuri kembali melalui teks dan orientasi topikal awal terdahulu selama dekade-dekade yang lampau. Bamyeh menghindari isu “kekhasan” ilmu-ilmu sosial Arab dan dampaknya pada metode penelitian, terutama karena mereka terus menimbulkan teka-teki teoritis bagi para ilmuwan sosial Arab (misalnya, ketegangan yang terus-menerus antara pendukung Gellner dan kerangka kesukuannya, dengan mereka yang lebih memilih Bourdieu dengan sosiologinya yang berpusat pada kelas). Namun pilihan-pilihan ini terus membentuk penelitian ilmu sosial masa kini di kawasan ini: para ilmuwan sosial Arab memperoleh visibilitas berkat publikasi asing, yang pada gilirannya membentuk orientasi penelitian mereka, baik yang bersifat tematik maupun metodologis.

Pendekatan Bamyeh sendiri dalam laporan ini mengangkat isu metodologis mengenai unit analisis: apakah masuk akal untuk mempelajari fenomena sosial secara abstrak atau untuk kawasan Arab secara keseluruhan, dan kemudian menghadapi kesimpulan-kesimpulannya pada konteks lokal dan nasional untuk menghasilkan kesimpulan lengkap dan dapat digeneralisasikan? Dengan demikian, dia merujuk ke “Islamisasi” ilmu-ilmu sosial di seluruh kawasan pada tahun 1980, kemudian berpaling ke suatu pembahasan rinci mengenai Arab Saudi, di mana logika ini terlihat secara khas, sebelum selanjutnya berkomentar mengenai menonjolnya penelitian mengenai keluarga dan kriminologi – ketimbang penelitian mengenai konflik sosial atau tenaga kerja asing, meskipun hal tersebut penting bagi negara tersebut. Demikian pula, Bamyeh membahas studi latar belakang oleh Mokhtar El-Harrach terhadap isi jurnal Arab, yang mencakup perbandingan lintas negara

untuk memahami bagaimana jurnal budaya Arab berfungsi, dan menemukan bahwa studi teoritis mencakup sampai sebanyak 68% dari isi jurnal. Namun dalam suatu komentar sambil lalu, ia mencatat bahwa jurnal-jurnal ini secara signifikan cenderung lebih berurusan langsung dengan kawasan daripada mengadopsi fokus Arab yang luas, tanpa memberikan penjelasan yang memadai mengenai apa yang menentukan hasil yang berbeda tersebut. Demikian pula, istilah “kepadatan penelitian” (jumlah pusat penelitian yang dibagi dengan jumlah penduduk suatu negara) digunakan untuk mengelompokkan dunia Arab, tetapi “suasana umum yang merawat mereka” ditawarkan sebagai faktor penjelasan berupa “perhatian pada ilmu sosial” dalam konteks yang berbeda. Penulis mengakui bahwa gambaran yang luas tersebut dibentuk oleh mekanisme, insentif, dan tekanan di bidang akademik, tetapi elemen-elemen yang halus dan khas tidak dibahas secara rinci.

Berdasarkan pengakuan penulis sendiri, laporan “survei” mengenai situasi saat ini dirancang sebagai pendahuluan untuk publikasi-publikasi berikutnya, yang akan menguraikan aspek-aspek yang berbeda, meliputi kurun waktu yang lebih luas daripada periode 2010-15, dan akan menyediakan bibliografi penelitian. Sementara laporan agak terhambat oleh keterbatasan ini, laporan tersebut berhasil menggambarkan bidang-bidang ilmu dan mengidentifikasi kekuatan-kekuatan yang membentuknya.

> Ilmu-ilmu Sosial dan Transformasi Sosial Arab

Survey Bamyeh terhadap struktur kelembagaan ilmu sosial adalah salah satu kontribusi terkuat laporan tersebut, terutama karena laporan tersebut mengangkat pertanyaan-pertanyaan yang penting bagi para praktisi yang menghadapi tantangan untuk memandu suatu ruang publik yang sedang berubah.

Datanya menggambarkan universitas-universitas Arab sebagai “rumah alami” bagi ilmu-ilmu sosial (48% dari universitas merupakan rumah bagi program dan gelar ilmu sosial). Suatu distribusi yang seimbang dari disiplin ilmu-ilmu – ekonomi, sosiologi, psikologi, ilmu politik, dan sejarah—didukung oleh suatu jaringan luas pusat-pusat penelitian yang berjumlah setidaknya 436, organisasi profesional di sebagian besar negara, dan 217 jurnal akademis. Datanya juga menyoroti kecenderungan yang menarik: para ilmuwan sosial Arab menguasai beberapa bahasa dan semakin terhubung secara global; dan Aljazair dan Mesir mewakili kawasan pangsa terbesar universitas dan pusat penelitian.

Angka-angka ini menyoroti suatu realitas lain: para ilmuwan sosial Arab menghadapi suatu ketegangan antara keharusan untuk melakukan produksi dan akumulasi pengetahuan, dan tekanan untuk menyebarluaskan, terlibat, dan melakukan advokasi perubahan sosial. Bamyeh

>>

membahas peningkatan pada arti penting “aktor non-tradisional,” seperti masyarakat sipil, dengan merujuk pada suatu makalah latar belakang menarik lain yang menyoroiti bagaimana organisasi non-pemerintah “tidak hanya menggunakan tetapi benar-benar menghasilkan ilmu sosial [...] yang dikalibrasi untuk tujuan mereka.” Demikian pula, mereka yang akrab dengan konteks Arab memahami pentingnya lembaga-lembaga pan-Arab seperti Pusat Studi Persatuan Arab di Beirut atau Pusat Penelitian dan Kajian Kebijakan Arab di Doha, yang visibilitasnya telah melampaui apa yang dipunyai oleh universitas. Transformasi kelembagaan ini memberikan urgensi bagi perdebatan tentang dampak evolusi ini pada produksi isi pengetahuan. Jika benar, sebagaimana dikemukakan oleh penulis, bahwa pusat-pusat ini tidak dapat menawarkan suatu pengganti bagi penelitian akademis, apakah ruang dan aktor “non-konvensional” ini menggambarkan adanya suatu krisis ilmu-ilmu sosial yang “formal”?

Komentar Bamyeh mengenai peran masyarakat sipil dan ilmu-ilmu sosial menunjukkan bahwa penulis mengakui kontribusi mereka untuk tujuan praktis, pengembangan data dokumenter, dan bahkan pertimbangan epistemik-nya, tetapi jelas lebih mengutamakan apa yang disebutnya “komunitas akademik” ketimbang “kuasi masyarakat akademik” (*quasi-academic communities*). “Ilmuwan dan cendekiawan [yang] menjalankan tugas-tugas [mereka],” dalam pandangannya, adalah orang-orang yang terlibat dalam metodologi analitis yang ketat, mencapai kesimpulan yang progresif, dan mendapatkan kredibilitas ilmiah – biasanya dari suatu jarak tertentu [...] ketimbang tenggelam dalam liku-liku pergumulan sehari-hari dan hanya mereproduksi pandangan politik yang tidak memberikan kepada kita apa-apa selain apa yang sudah kita ketahui.” Demikian pula, dalam studinya terhadap jurnal dan surat kabar, kriterianya untuk menentukan butir mana yang layak diberi cap ilmu sosial mencakup “kedalaman” – dipahami sebagai “kompleksitas” atau “muatan ilmu;” Bamyeh, yang melangkah dengan memberikan contoh, menempuh langkah-langkah demi membenarkan pilihan metodologisnya, dengan suatu gaya yang lebih mengingatkan kita pada penelitian akademis ketimbang sebuah laporan yang berorientasi pada kebijakan

Preferensi ini menggambarkan visi penulis mengenai suatu transformasi epistemologis yang revolusioner, terutama dalam kaitannya dengan perdebatan tentang transformasi kesejarahan yang melibatkan *Arab Spring*, dan bidang ilmu-ilmu sosial di dunia Arab. Kami dapat berkeberatan terhadap penulis yang melawan arus dengan pandangan klasiknya mengenai apa yang merupakan “revolusi,” dan terutama pertimbangannya yang kurang memadai terhadap dampak transformatif *Arab Spring* pada generasi baru ilmuwan sosial Arab, “generasi *Arab Spring*,” yang landasan sosialnya membentuk keterlibatan dan aspirasi mereka untuk perubahan.

Gambaran ideal Bamyeh mengenai ilmuwan sosial Arab yang jauh, terisolasi, dan objektif pun tidak mewakili suatu sikap pilihan di masa lalu. Yang dapat dibawa *Arab Spring*, sebagai sebuah revolusi epistemologis, adalah suatu pergeseran dari pandangan realitas sebagai suatu tempat kacau yang mengalihkan perhatian dan memerlukan jarak, ke arah suatu pandangan membumi yang diperbarui dengan koneksi organik, yang membawa aspirasi terukur ke dalam penelitian, ketimbang mencoba untuk mendisiplinkan penelitian ilmu sosial melalui kerangka ketat, yang sering tidak pas.

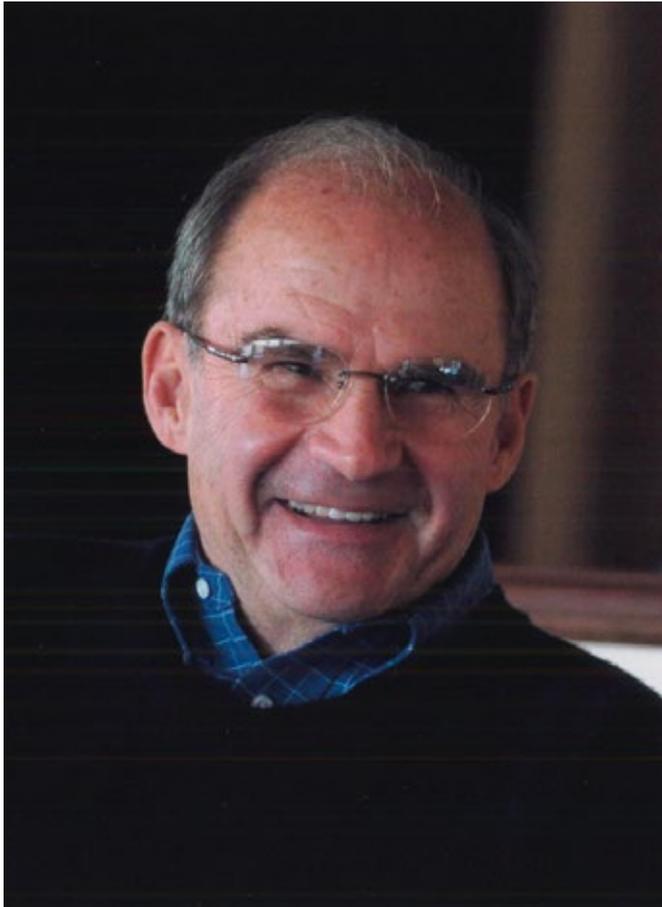
> Kesimpulan

Kesimpulan Mohammed Bamyeh berbeda dengan kesimpulan saya sendiri. Bamyeh menetapkan untuk melakukan survei terhadap suatu lapangan yang besar, memandangnya bolak-balik dalam kaitannya dengan *Arab Spring*, namun laporannya hanya mencatat pertumbuhan dan tantangan ketimbang menawarkan rekomendasi. Dalam kesimpulannya, ia menyerukan diadakannya transformasi lebih lanjut sebelum ilmu-ilmu sosial Arab dapat “menyatakan bahwa mereka telah secara mantap menampung ilmu-ilmu sosial dan menggunakannya dengan segala keragaman penampilannya” – suatu tujuan akhir yang cukup berputar-putar (*circular*), yang mengungkapkan bahwa ilmu-ilmu sosial Arab masih harus menemukan apa makna mereka dalam kaitan dengan gejolak sosial sekarang ini.

Alih-alih berfokus pada “kehadiran” ilmu sosial, mungkin kita harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang lebih dinamis yang berkaitan dengan “kelanggengan,” “ketahanan,” “koherensi”, atau “subsistensi.” Berbicara dari sudut pandang “generasi *Arab Spring*” ketimbang mengenai topik, tatanan kelembagaan, dan metode, hal yang membuat ilmu-ilmu sosial di dunia Arab memiliki ciri khas adalah kombinasi kejadian kritis di dalam mana mereka menemukan diri mereka. Seraya ilmu-ilmu sosial Arab mencari suatu identitas, kami memiliki suatu kesempatan untuk mengekspresikan aspirasi banyak orang di kala kami mendesain agenda penelitian yang ketat. Mungkin laporan ini akan mengarahkan kita ke jalan menuju suatu dialog aktif yang dituntut oleh situasi. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Idriss Jebari <idrissjebari@gmail.com>

> George Ritzer tentang McDonaldisasi dan Prosumpsi



George Ritzer.

George Ritzer adalah salah seorang penafsir terkemuka globalisasi, dan Profesor Kehormatan (*Distinguished Professor*) Sosiologi di Universitas Maryland, Amerika Serikat. **Labinot Kunushevi**, mahasiswa master bidang sosiologi di Universitas Prishtina, Kosovo, mewawancarainya sebagai bagian dari proyek tentang teori sosial yang berpengaruh. Kami menerbitkan petikan dari wawancara tersebut.

LK: Profesor Ritzer, anda terkenal karena konsep “McDonaldisasi” (*McDonaldization*): apakah menurut anda ini sejenis imperialisme budaya atau sekedar hasil dari persaingan bebas dalam pasar?

GR: Sebagian besar karya saya sejak sekitar tahun 1990 berkuat secara langsung maupun tidak dengan imperialisme budaya. *The McDonaldization of Society* (terbit pertama kali 1993) memandang “McDonaldisasi” sebagai salah satu bentuk kekuatan seperti itu, dengan prinsip-prinsipnya (efisiensi, kepastian, kalkulasi, dan pengendalian, maupun irasionalitas yang terkandung dalam sistem-sistem yang rasional ini) yang diekspor dari basisnya di Amerika ke banyak negara di dunia. Bentuk yang kelihatan adalah McDonald’s dan globalisasi berbagai perusahaan lain asal Amerika, tetapi yang lebih penting lagi, prinsip-prinsip McDonaldisasi masuk ke dalam perusahaan lokal dan berbagai organisasi lain yang tak terhitung jumlahnya (misalnya lembaga-lembaga pendidikan dan keagamaan).

Dalam buku saya: *Expressing America: A Critique of the Global Credit Card Society* (1995) saya bicara tentang satu bentuk lain dari imperialisme budaya (dan ekonomi) yaitu penyebaran suatu ciptaan lain Amerika, kartu kredit, ke seluruh penjuru dunia. Kartu kredit ikut menyebarkan budaya utang dan konsumtif Amerika, suatu gejala yang saya terangkan secara lebih khusus dalam buku saya, *Enchanting a Disenchanted World: Revolutionizing the Means of Consumption* (1997). Gagasan mengenai sarana konsumsi merupakan perpanjangan dari konsep Marx mengenai sarana produksi. Lokasi konsumsi terbesar di Amerika Serikat adalah restoran cepat saji, pusat perbelanjaan, taman hiburan (misalnya, *Disney World*), kasino gaya Las Vegas, dan jalur pelayaran dengan kapal pesiar super megah – yang kesemuanya diekspor ke seluruh dunia pula dan menjelma menjadi tujuan wisata idaman. Ukuran yang sering besar dan ciri “menyihir” yang hampir-hampir religius itu, mendorong saya untuk menyebut tempat-tempat demikian sebagai “katedral konsumsi.” Seraya mengglobal, katedral-katedral konsumsi itu telah berperan dalam menumbuhkan jenis masyarakat hyper-konsumtif yang sedemikian menandai Amerika Serikat. .

Yang paling penting di bidang ini, setidaknya menurut saya,

>>

adalah buku saya: *The Globalization of Nothing*. “Ketiadaan”(nothing) saya definisikan sebagai bentuk-bentuk sosial yang muncul dari pusat, dikendalikan oleh pusat dan tidak memiliki kekhasan. Seperti biasa, *McDonald’s* dan produk-produknya (misalnya *Big Mac*) adalah contoh yang sempurna, tetapi “ketiadaan” sudah semakin mendunia, terutama melalui katedral-katedral konsumsi itu. Ketiadaan global ini telah ikut berperan dalam semakin memarginalkan bentuk-bentuk “sesuatu” (*something*) yang bersifat lokal (ciptaan lokal, dikuasai lokal, dan dengan muatan lokal yang sangat unik). Jadi, kita memiliki suatu dunia yang berkembang maju yang semakin ditandai oleh ketiadaan!

LK: Anda juga telah memperluas pemikiran anda mengenai konsumsi global itu pada universitas: apa pendapat anda mengenai universitas modern?

GR: Saya sering merujuk ke universitas saat ini sebagai *McUniversity*. Maksudnya, universitas telah melakukan *McDonaldisasi* proses pendidikan dengan menempatkan fokus pada efisiensi, kepastian, kalkulasi dan kontrol. Langkah ini memang telah membantu terciptanya sistem pendidikan yang masal tetapi irasionalnya rasionalitas sistem ini ialah bahwa sistem ini berakibat negatif pada kualitas sistem pendidikan dan kualitas pendidikan. Dalam arti bahwa sistem ini menyerupai pengaruh restoran cepat saji pada kualitas makanan (anda bisa mendapatkan “*Big Mac*” tapi bukan “*Mac* yang lezat”). Sistem ini juga membuat universitas mudah berpihak pada status quo daripada melawannya. Menurut saya *McUniversity* ini semakin memonopoli pengetahuan dan proses penyebarannya. Karya saya terbaru adalah mengenai “prosumsi” (*prosumption*) – gabungan “*production*” dan “*consumption*” Mahasiswa selamanya adalah prosumen pengetahuan – mereka mengonsumsi dan menghasilkan pengetahuan dengan caranya khas mereka sendiri-sendiri. Mahasiswa bukanlah konsumen pasif dari apa yang ditawarkan oleh sistem-sistem ini, melainkan juga produsen pengetahuan dan segala hal yang terjadi di dalamnya dan pengetahuan yang mengalir dari dalamnya.

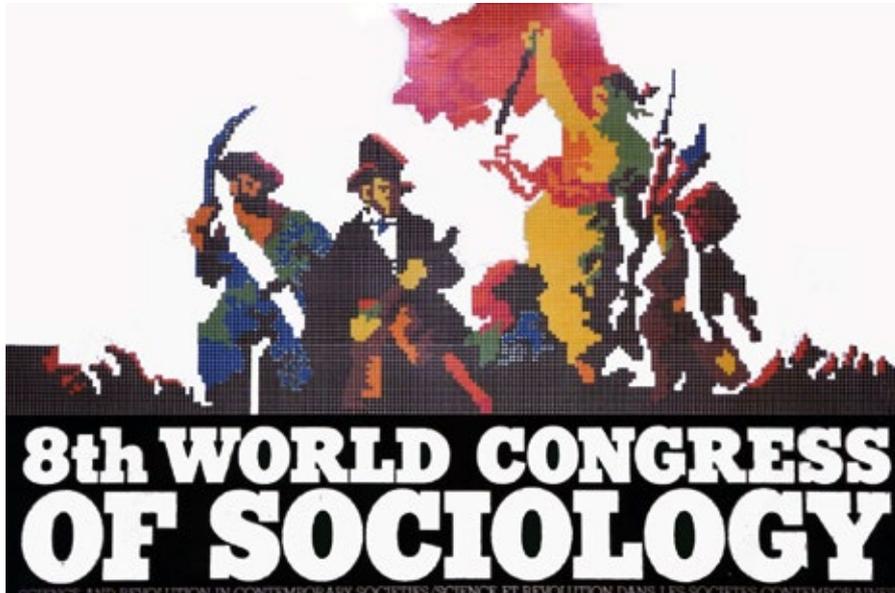
LK: Anda seorang penulis yang sedemikian produktif, saya yakin anda punya banyak proyek baru dan menarik – bisakah anda ceritakan secara singkat?

GR: Sebagian besar tulisan saya selama sepuluh tahun terakhir ini mengenai prosumsi. Kita semua adalah prosumen (*prosumers*) – tidak pernah melulu produsen atau konsumen saja (oposisi biner modern yang harus kita buang). Lokasi paling penting prosumen saat ini adalah internet, tempat kita melakukan prosumsi (*prosume*) dalam blog, Facebook, dan lain-lain. Kita semakin menjadi prosumen di katedral-katedral konsumsi di mana kita selaku “konsumen” melakukan semakin banyak “pekerjaan” yang sebelumnya pernah dilakukan oleh karyawan yang dibayar (ingat pekerjaan yang kita lakukan di restoran cepat saji, pusat perbelanjaan, IKEA, dan lain-lain). Belakangan ini saya mengajukan pendapat baru bahwa kita sekarang hidup dalam era “kapitalisme prosumen” di mana para kapitalis lebih mengutamakan prosumen tanpa bayaran atau yang dibayar rendah dibanding memakai pegawai upahan. Uber adalah contoh yang tepat mengenai hal ini: sopir taksi menghilang di hadapan kemunculan prosumen yang bekerja untuk Uber. Ketika kita memesan buku di *Amazon.com*, kita tidak hanya mengonsumsi buku (dan produk-produk lain), melainkan juga memproduksi, tanpa bayaran, pesanan kita sendiri. Akibatnya, toko-toko buku dan para pekerjanya semakin langka. Sebagai akibatnya, para kapitalis baru (Mark Zuckerberg, Jeff Bezos) muncul dan menjadi milyader karena mengganti pekerja upahan dengan prosumen tanpa bayaran. Bukan hanya prosumen itu tidak dibayar, mereka juga bukan pegawai sehingga tidak perlu diberi tunjangan, asuransi kesehatan dan semacamnya. Teknologi baru (misalnya robot) akan mengubah bisnis menjadi semakin tergantung pada prosumen (atau mereka akan melakukan prosumsi sendiri sebagai “mesin prosumsi”). ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada George Ritzer <gritzer@umd.edu> dan Labinot Kunushevci <labinotkunashevci@gmail.com>

> 40+ Tahun Bersama Sosiologi Internasional

oleh **Edward A. Tiryakian**, Universitas Duke, AS, dan anggota Komite Penelitian ISA di bidang Sejarah Sosiologi (RC08), Teori Sosiologi (RC16) dan Sosiologi Agama (RC22)



Poster untuk Kongres ISA 1974 di Toronto, Kanada – Kongres pertama yang dihadiri Edward Tiryakian

Saya menyambut gembira undangan berbagi pengalaman tentang keikutsertaan saya yang cukup lama dalam *International Sociological Association (ISA)*. Sekedar catatan, ingatan saya terkait masa lampau tidaklah lengkap dan tak juga luput dari kikisan waktu; para pembaca tentunya akan mendapatkan manfaat dengan membaca uraian unggul dari Jeniffer Platt tentang ISA dalam tulisannya [A Brief History of the ISA, 1948-1997](#).

Arena internasional selalu menarik bagi saya, sebagai komponen vital yang sepadan dengan ketertarikan saya pada teori sosiologi. Sebagai seorang dosen yang berafiliasi dengan Ikatan Sosiologi Amerika (*American Sociological Association (ASA)*), saya terlibat dalam Komite Kerjasama Dunia ASA (*ASA Committee on Worldwide Cooperation*), dan menjadi ketuanya ketika ketua sebelumnya, Reuben Hill, menjadi Presiden ISA (1970-74). Reuben, yang sa-

ngat berharap agar sosiologi Amerika dapat berkembang di luar AS, mengundang saya untuk bergabung dengan ISA. Kesempatan pertama saya terjadi tahun 1974, ketika Reuben mengundang sosiolog Rusia untuk hadir dalam Kongres Dunia kedelapan ISA di Toronto. Menyusul pertemuan-pertemuan ISA, para anggota delegasi langsung diundang ke pertemuan-pertemuan ASA yang diselenggarakan di Montreal.

Dalam kedua pertemuan tersebut, Komite Kerjasama Dunia kami menyediakan tautan bagi para pengunjung dari luar negeri. Secara khusus saya mengingat pertemuan dengan para sosiolog Rusia; ketegangan akibat Perang Dingin sirna dengan cepatnya seiring dengan suasana di resepsi yang penuh dengan pijar-pijar kegembiraan dan kebersamaan. Bagi Reuben Hill dan dan Presiden ASA Peter Blau, pertemuan bersama ini membuktikan kemenangan diplomasi sosiologi.

Selanjutnya, saya mengambil keanggotaan seumur hidup dalam ISA – salah satu investasi terbaik yang pernah saya buat. Dalam Kongres Kesembilan di Uppsala, saya mengingat bagaimana berkembangnya pertemuan-pertemuan di sana, tetapi juga bagaimana Swedia sangat mahal dan sangat modern. Dan mungkin karena Uppsala (tak seperti Toronto atau Stockholm) lebih merupakan sebuah kota kampus daripada sebuah metropolis, tempat ini tidak banyak memberikan pengalih perhatian, melainkan memberikan banyak peluang untuk pertemuan antara para ilmuwan dari berbagai negara – suatu atraksi utama untuk pertemuan internasional bagi para ilmuwan.

Setelah Uppsala, Kongres Kesepuluh ISA di Mexico City (1982) berlangsung dengan banyak sesi dalam bahasa Spanyol, bahasa resmi ketiga ISA, sebagaimana kami selalu diingatkan secara rutin oleh Alain Touraine dengan disertai sambutan meriah para mahasiswa Amerika Latin. Touraine, perlu diingat, merupakan seorang perintis progresif bagi sosiologi dunia, baik dalam berbagai kongres dunia maupun dalam seminar-seminar mengenai perkembangan yang diselenggarakannya di Perancis.

Namun ketika pertemuan-pertemuan ISA tahun 1982 sedang berlangsung, kami mengalami anomi finansial: Menteri Keuangan Meksiko menyatakan bahwa negaranya tak mampu memenuhi pembayaran hutang, sehingga terjadi krisis finansial besar. Para delegasi ISA dibiarkan berebut mencari dolar di bank-bank Meksiko; tetapi komunikasi finansial runtuh, yang menyebabkan menyebarnya kebingungan terkait nilai tukar mata uang. Selain nilai tukar berubah hanya dalam waktu semalam, cabang-cabang bank dari bank yang sama pun sering tidak tahu berapa nilai tukar yang ditetapkan oleh bank sentral Meksiko. Beberapa anggota ISA yang dapat menggunakan kartu kredit mereka mengetahui bahwa mereka mampu pindah kamar hotel dari ruang *standard* ke *deluxe*, ketika peso terjerembab dan dolar naik tajam. Tapi tidak semua orang diuntungkan, dan banyak orang meninggalkan Meksiko dengan penerbangan pertama yang tersedia.

Seingat saya ini adalah satu-satunya pertemuan ISA yang berlangsung dalam situasi krisis. Kongres Keduabelas di Madrid berlangsung dengan baik, kecuali terkait panas yang menyengat dan ketiadaan penyejuk udara. Dalam Kongres Ketigabelas (1994) di Bielefeld, Richard Grathoff mengundang sejumlah sosiolog dari Polandia dan negara lain di Eropa Timur yang telah berusaha mempertahankan hidupnya sosiologi dalam era represif rezim Soviet yang runtuh pada tahun 1991.

Saya memiliki banyak kesamaan dengan Grathoff, yang menempatkan sosiologi kualitatif, interpretatif pada pusat pengembangan teori sosiologi, dan saya gembira ketika ia meminta saya untuk melanjutkan di dewan editor *International Sociology* ketika ia mengambil alih posisi editor (1991-1996). Saya bergabung dalam dewan editor ketika Martin Albrow menjadi editornya yang pertama (1984-1990), dan saya sangat menikmati kedua posisi sebagai kontributor dan penelaah sejawat (*reviewer*) untuk jurnal yang memberikan tempat utama untuk sosiologi komparatif internasional.

Meskipun menghandiri seluruh pertemuan ISA secara praktis tidak mungkin (baik karena biaya perjalanan sejak pensiun, dan karena komitmen saya untuk ASA, yang pertemuannya seringkali bersamaan dengan pertemuan-pertemuan ISA), saya bersyukur masih menghadiri sejumlah kongres: Montreal (1998), Brisbane (2002), Gothenburg (2010), Yokohama (2014), dan forum ISA baru-baru ini di Vienna (2016). Berjumpa dengan kawan-kawan lama dari berbagai penjuru dunia (yang sayangnya jumlah makin menurun), bertemu dengan kawan-kawan baru, dan dipertemukan dengan ide-ide sosiologis yang baru dari berbagai tempat dengan budaya yang berbeda masih tetap memikat seperti ketika saya pertama kali bergabung dengan *International Sociological Association* – dan pasti akan menarik saya kembali untuk hadir dalam Kongres Kesembilanbelas tahun 2018 di Toronto. ■

Seluruh korespondensi ditujukan kepada Edward Tiryakian <durkhn@soc.duke.edu>

> Memperkenalkan Tim Editorial Jepang yang Kedua

Merupakan sebuah kebahagiaan besar bagi kami untuk memperkenalkan tim editorial Jepang yang kedua kepada para pembaca *Global Dialogue*. Sejak kami memulai pekerjaan kami pada bulan Desember 2014, sebanyak 45 mahasiswa jenjang sarjana telah berpartisipasi dalam proyek penerjemahan. Mereka semua kuliah di Universitas Perikanan Nasional (*National Fisheries University*) yang didirikan pada tahun 1941 sebagai suatu lembaga pendidikan tinggi publik yang diakreditasi oleh Departemen Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (*Ministry of Agriculture, Forestry and Fisheries*) di Jepang. Dewan editorial terdiri dari anggota-anggota tetap sebagai berikut.



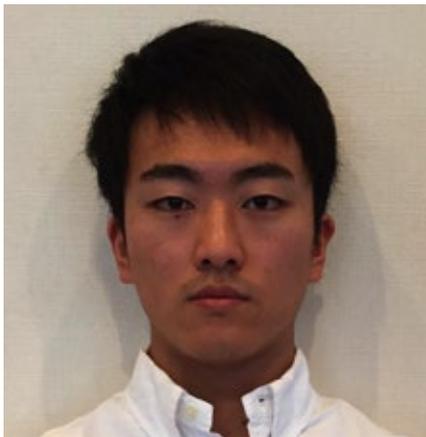
Satomi Yamamoto adalah Profesor Madya bidang Bahasa Inggris dan Sosiologi di Departemen Distribusi dan Manajemen Perikanan. Ia meraih gelar Master of Arts (M.A) dalam Bahasa Inggris dari Universitas Perempuan Jepang (*Japan Women's University*), Master of Arts bidang Ilmu-ilmu Sosial dari Universitas Chicago, dan Ph.D di bidang Sosiologi dari Universitas Illinois di Urbana-Champaign. Penelitian terkininya berfokus pada analisis sosiologis tentang spesies ikan invasif di Amerika Serikat.



Fuma Sekiguchi adalah seorang mahasiswa senior jenjang sarjana di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan. Ia lahir di Prefektur Yamaguchi dan dibesarkan di Prefektur Chiba. Ia cuti dari Universitas Perikanan Nasional dan kini sedang menempuh pendidikan di *California State University* di Chico dan *Butte College* di Amerika Serikat. Motonya adalah bahwa kegagalan mengajarkan kesuksesan. Dia suka berenang, bermain bisbol, dan belajar bahasa Inggris.



Yutaro Shimokawa adalah seorang mahasiswa tingkat dua jenjang sarjana di Departemen Ilmu dan Teknologi Pangan. Saat ini ia sedang belajar tentang penggunaan yang efektif dari teknologi pengolahan dan komponen-komponen makanan hasil laut. Ia berpartisipasi dalam proyek penerjemahan karena ia ingin meningkatkan kemampuannya membaca dalam bahasa Inggris. Tujuannya adalah untuk dapat membaca artikel akademis tentang ilmu pangan yang ditulis dalam bahasa Inggris.



Masaki Yokota adalah seorang mahasiswa senior jenjang sarjana di Departemen Distribusi dan Manajemen Perikanan. Ia belajar bahasa Inggris di Inggris Raya antara tahun 2014 hingga 2015 dan meraih skor 6.5 dalam IELTS (*International English Language Testing System*). Ia suka bermain badminton dan menonton sepak bola. Tim sepak bola favoritnya adalah Klub Sepakbola Chelsea di London. Mimpinya adalah melakukan perjalanan mengelilingi dunia.



Takashi Kitahara adalah seorang mahasiswa senior jenjang sarjana di Departemen Distribusi dan Manajemen Perikanan. Ia akan bergabung dengan Sekolah Pascasarjana Manajemen Sumber Daya dan Ilmu Pangan, Universitas Perikanan Nasional pada bulan April 2017. Skripsinya yang mendapat penghargaan mengeksplorasi pengembangan usaha bisnis budidaya air non-pakan di Jepang. Ia berpartisipasi dalam proyek penerjemahan karena ia menikmati belajar topik-topik baru selain perikanan.



Yuki Nakano adalah seorang mahasiswa tingkat dua jenjang sarjana di Departemen Biologi Air Terapan. Ia memutuskan untuk masuk Universitas Perikanan Nasional karena ia menyukai binatang dan ikan sejak kecil. Karir masa depannya masih belum ditentukan, namun ia ingin menemukan pekerjaan yang erat kaitannya dengan bidangnya. Ia kadang-kadang kewalahan dengan tantangan untuk menerjemahkan bahasa Inggris ke dalam bahasa Jepang yang alami, tapi ia masih menikmati menjadi bagian dari proyek penerjemahan karena proyek ini membantunya untuk meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya dan untuk dapat lebih menguasai bahasa Jepang.